

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas Ia
Tanjung Karang No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas
Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

QISTOSI

NPM : 1221020043

Jurusan : Jinayah Siyasah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 / 2017**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negri Kelas Ia
Tanjung Karang No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas
Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
QISTOSI

NPM : 1221020043

Jurusan : Jinayah Siyasah

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 / 2017**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung
Karang No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk)

Islam telah mengatur kasus korupsi dalam *fiqh Jinayah*, pada hal ini putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang merupakan tindakan untuk menegakkan hukum, bisa di ibaratkan dalam hal ini adalah sebuah kapal yang sedang berlayar dan mengangkut penumpang dengan berbagai kepentingan, agar dapat dicapai dengan selamat dalam mengarungi samudra ini maka sang kapten kapal harus menegakkan aturan main seperti yang telah mereka sepakati.

Pada kasus No.62/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang pengadaan peralatan kesehatan puskesmas oleh dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang telah menetapkan status terdakwa menjadi tersangka dan mutlak menjadi tahanan , kasus ini merupakan kategori kasus Pidana Khusus, dalam surat tersebut telah di putusan masa hukuman dan denda sangsi yang harus dibayar, serta pemaparan barang bukti.

Dengan itu timbulah pertanyaan, Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 62/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan metode kualitatif ,data diperoleh dari hasil pengolahan data primer dan sekunder, dengan teknik interview dan dokumentasi, Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Maka hasil dari penelitian ini menyimpulkan Pasal 435 KUHP menjelaskan korupsi berarti busuk, buruk, bejat, dan dapat di sogok, atau disuap intinya merupakan perbuatan yang buruk.

Perbuatan korupsi Dalam istilah *kriminologi* di golongan kedalam kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek Undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau puun tidak secara langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

Hukum Islam memandang bahwa hukuman Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang merupakan suatu keharusan, karena dalam *ALqur'an* dan *Hadist* Pun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hukuman yang detail kepada pelaku tindak pidana korupsi, namun hukuman hanya sebatas hukuman norma moral di masyarakat dan hukuman ancaman neraka, namun ketika memasuki harta pencurian secara tegas dalam *Al-qur'an* menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri harta orang lain tersebut haruslah di potong tanganya.

Dalam kasus korupsi yang terjadi pada saat ini, atau lebih tepatnya kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang ini secara hukum formal, yaitu hukum yang berdasarkan undang-undang. sepenuhnya diberikan kepada kekuasaan Hakim yang mengadili, namun hakim harus mengingat norma-norma yang diterapkan di masyarakat, serta norma-norma agama



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung 35131 (0721)7510755

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HUKUMAN BAGI TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang
No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk)**

Nama

Qistosi

NPM

1221020043

Jurusan

Jinayah Siyasah

Fakultas

Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkannya dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, September 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

NIP. 1960010211991031002

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

NIP.197509302003121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Jinayah Siyasah

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.

NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung 35131 (0721)7510755

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI** (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negri Kelas Ia Tanjung Karang No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk) disusun oleh **QISTOSI, NPM 1221020043**, Jurusan **Jinayah Siyasa**, telah diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : **Rabu, 06 September 2017**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I

Sekretaris : Muhammad Irfan, M.H.I

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

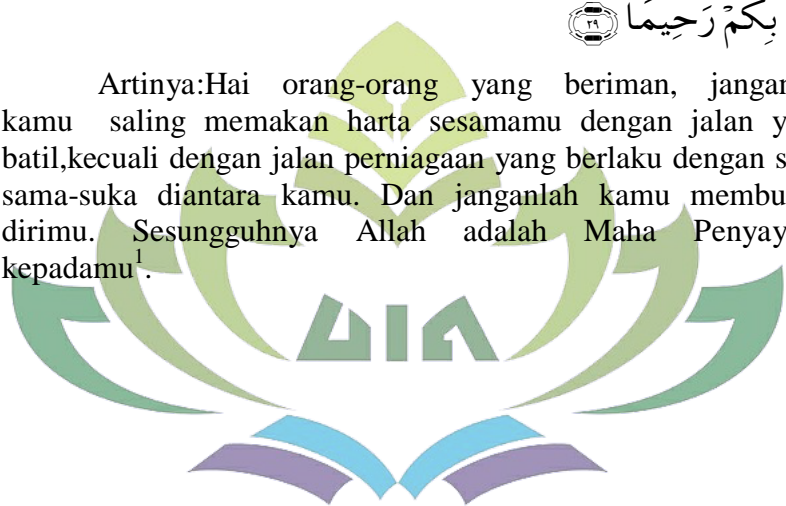
Dr. Alamsyah, M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹.



¹ Al-Quranul Karim. An-Nisa: 29

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas maka skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk orang tuaku tersayang (Ayahanda M.THOIB dan Ibunda SYAHRO), (Bapakku SYARIFUDDIN dan ibundaku MUQODDIMAH). Keempat orang tuaku yang selalu dan sangat saya sayangi , kerna berkat doa mreka yang senantiasa mereka berikan, kasih sayang mreka, dukungan moril maupun materil,nasehat,dan Lain-lain.
2. Abang dan kakak-kakakku, ROSDA ULFA, SYARAHUDDIN,MUKHLIS,SITI HANNAH, YUSRINA DAN HUSNIMU BAROK. Yang selalu memberikan motivasi.
3. Sanak familyku yang selalu memberikan spirit dan menanti keberhasilanku, ROSA SEPTIAWAN,GUSTAMA FERYANDA, DIAN SAPUTRA, ASBAUL QORIB, ANDIKA PARASTIA, SH.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu jurusan pidana politik 2012, dan adik adikku baik tataran kampus maupun ORGANISASI, AJI PURWADI, GUSTI R, IRAWAN TH, IRFAN ALMANDA, FRORI F, AHMAD ALFADILAH, MULYADI, JONI SOPYAN. ROFIQUL UMAM, Dan seluruh adik-adik organisai HMI WABIL KHUSUS SYARIAH DAN FEBI yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kalian semua telah memberikan motivasi buat saya dan semnagat pastinya. Para dosen yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermamfaat baik didunia maupun diakhirat, amin.
5. Seluruh sonior-soniorku yang ada di HMI, berkat kalian saya bisa seperti ini , motivasi arahan dan ilmu kalian yang terus kalian berikan kesaya , semoga bermamfaat bagi saya. Amin
6. Almamaterku tercinta UIN REDEN INTAN LAMPUNG yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama QISTOSI Lahir di Pekon Banjar Manis Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Hari Jum'at Pada Tgl. 16 juni 1994, Anak Pertama Dari Satu Saudara, dari pasangan Ayah yang bernama M.Thoib Dan Ibu bernama Sahro.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Banjar Manis, Kecamatan Cukuh balak Kabupaten Tanggamus. Pada Tahun 2000 dan selesai pada Tahun 2006. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 putihdoh Cukuh Balak (SMPN) 2006-2009, kemudian ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 BULOK Tanggamus (SMAN) dan tamat pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012 Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya ke UIN RADEN INTAN LAMPUNG, Program Strata Satu (S-1) Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah (JS).

Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif berbagai kegiatan, di kegiatan organisasi baik intra ataupun ekstra kampus. Salah satunya Di organisasi intra kampus penulis pernah menjabat sebagai kepala bidang politik dan kemahasiswaan fakultas syari'ah (BEM-FS) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG Periode 2013-2014. Aktif di bidang Devisi Politik Majelis permusawarahan mahasiswa (MPM-I) Periode 2013-2014.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada jurusan Jinayah Siyasah UIN LAMPUNG. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Para sahabat, keluarga dan pengikutnya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan ummat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan IPTEK serta diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan agama Islam.

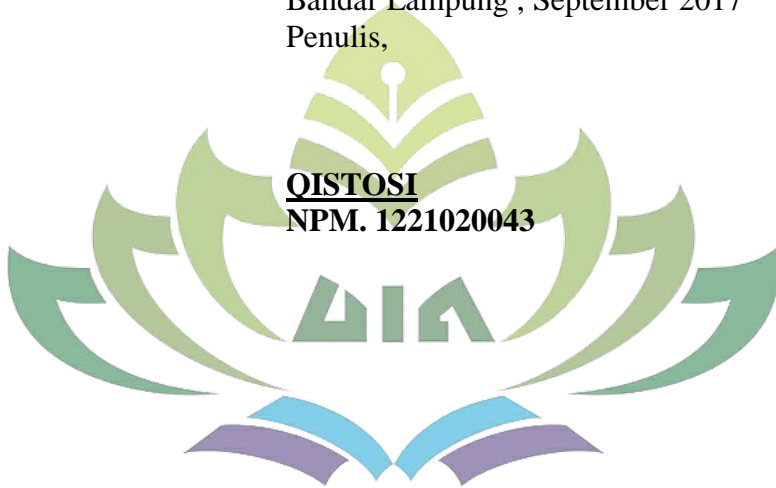
Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Bimbingan dan motivasi semua pihak member arti yang sangat tinggi bagi penulis. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. M. Mukri, M,Ag selaku rektor UIN RADEN INTAN LAMPUNG
2. Bapak Dr.Alamsyah, M.Ag selaku dekan fakultas syariah UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
3. Bapak Drs. Susiadi AS,M.Sos.I selaku ketua jurusan jinayah siyasah fakultas syariah UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
4. Bapak Drs.H. Irwantoni, M. Hum. Selaku pembimbing I, dan Bapak Eko Hidayat,S.Sos.,M.H. selaku pembimbing II, Yang telah banyak mengeluarkan banyak waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen , para staf karyawan fakultas syariah UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan fakultas syariah dan universitas yang telah memberikan informasi data referensi dan lain-lain.

Semoga Amal baik Bapak dan Ibu serta semua pihak akan diterima dan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini bermamfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi para penegak hukum. *Amin yarobbal alamin.*

Bandar Lampung , September 2017
Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metodologi Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam (<i>RISYWAH</i>)	11
1. Pengertian	11
2. Unsur-unsur risywah	15
3. Dasar Hukum	16
4. Macam-macam tindak pidana korupsi	21
a. <i>Ghulul</i> (penggelapan)	21
b. <i>Sariqah</i> (pencurian)	21
c. <i>Khiyanat</i> (Khianat)	22
d. <i>Risywah</i> (Suap)	23
e. <i>Ghasab</i> (Mengambil Paksa Hak/ Harta Orang Lain)	25
f. <i>Hirabah</i> (Perampokan)	26
g. <i>Hadiyyah</i> (Gratifikasi)	27
B. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif....	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Korupsi dalam Hukum Positif	27

2. Sejarah dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif	31
4. Penegakkan hokum terhadap tindakan Pidana korupsi dalam hukum Positif	33

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang....	39
B. Putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk .	53

BAB IV ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang....	81
B. Pandangan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang penanggulangan Tindak pidana korupsi.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping langkah ini merupakan proses penajaman terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS IA No.62/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk (Tentang Hukum bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi)”

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Hukum Islam menurut Prof. Mahmud Syaltout, *syari'at* adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya didalam hubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan Alam seluruhnya dengan kehidupan.²

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.³

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.145

² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas hukum mu'amalat (hukum perdata Islam)*, (Jogjakarta:Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h.1

³ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h.146

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Dan merupakan suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁵ Yang pada hal ini adalah penyelewengan uang Negara untuk kepentingan pribadi dalam kasus No. 62/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul di skripsi, hal ini dikarenakan peneliti ingin menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Hukum bagi Pelaku Korupsi.

Karena terkait judul tersebut melihat dari sudut pandang hukum Islam tentang hukuman bagi para pelaku pidana korupsi

2. Alasan Subyektif

Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya. Selain itu judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan penulis ambil di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

⁴ Tri Andarisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan dasar Aturan Umum Hukum Pidanan Indonesia*, (Univesitas Lampung, 2009),h.70

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.130

C. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur kasus korupsi dalam *fiqh Jinayah*, pada hal ini putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang ini merupakan tindakan untuk menegakkan hukum, bisa di ibaratkan dalam hal ini adalah sebuah kapal yang sedang berlayar dan mengangkut penumpang dengan berbagai kepentingan, agar dapat dicapai dengan selamat dalam mengarungi samudra ini maka sang kapten kapal harus menegakkan aturan main seperti yang telah mereka sepakati, peristiwa ini telah dijelaskan dalam salah satu hadist sebagai berikut:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَقْعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ بَخُوا وَبَخُوا جَمِيعًا.

“Dari Nu'man ibn Basyir, RA. Dari Nabi SAW, bersabda: “Perumpamaan pelaksana hukum Allah dan orang yang melanggarnya, bagaikan sekelompok orang yang melakukan undian (untuk menentukan tempat yang akan ditempati) pada sebuah kapal. Sebagian mereka mendapat tempat pada bagian atas, dan sebagian yang lain pada bagian bawah. Orang-orang yang menempati bagian bawah, ketika ingin mengambil air, harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas. Lalu mereka berpendapat, kalaulah kita melubangi yang bagian kita satu lubang, tentu kita tidak akan merepotkan orang-orang yang berada di bagian atas. Jika mereka membiarkan orang-orang itu melakukan apa yang mereka inginkan,

mereka akan celaka semuanya. Dan jika dapat menghentikan mereka, mereka akan selamat, dan selamat semuanya⁶.”

Kemudian dalam *Fiqh Jinayah*, beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah: Ghulul (penggelapan), *Risywah* (Penyuapan), Ghasab (mengambil paksa hak/harta orang lain), *Khianat*, *Sariqah* (pencurian), *Hirabah* (perampokan), *Al-maks* (pungutan Liar), *Al-Ikhtilas* (pencopetan), dan *Al-ihthab* (perampasan). Dalam *Alqur'an* telah diterangkan salah satu contoh dari kasus diatas yaitu⁷:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Tindak pidana korupsi berkembang pada setiap lini. Undang-undang nomor 31 tahun 1990 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diundangkan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran hukum. Di Indonesia istilah korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁸

⁶ H.R. Bukhari dalam Bab Syirkah, no. 2493 dan Bab Syahadat no. 2686; Tirmidzi dalam Bab Al-Fitan, no. 2173; Ahmad no. 4/268; dan Baihaqi dalam Sunan al-Kubra no. 7576 dalam bab Syu'b al-iman

⁷ Qs. Ali-Imran ayat 161

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.170.

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Disebutkan bahwa, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. selanjutnya ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau *auto koperasi* yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Segala bentuk korupsi dalam arti luas, yang berkaitan dalam segala bidang mempunyai dampak yang buruk terhadap negara dan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dalam hal jumlah kerugian negara yang semakin meningkat. Sedangkan dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan juga semakin sistematis serta masuk di setiap lini. Untuk itu, upaya penanggulangan korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tapi menuntut cara-cara yang luar biasa.

Ada sebagian kalangan menduga bahwa terjadinya kejahatan korupsi berhubungan dengan lemahnya para penegak hukum, yang berakibat pada terjadinya manipulasi penyelenggaraan penerapan hukum secara adil, dan kekebalan bagi pelanggar hukum dengan beraneka ragam imbalan yang diatur rapih. Selain itu, adanya mekanisme kegiatan legislatif sebagai pembentuk undang-undang yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan, karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum (pemilu) sering berkaitan dengan aktifitas pengusaha dan usahanya yang sama-sama saling membutuhkan. Dalam hal sistem pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha akan lebih mudah menjurus untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Terlebih lagi suatu sistem koneksi yang bersifat perorangan atau kelompok dibidang-bidang perbankan, jabatan negara dan perusahaan bermodal besar yang selalu mengandalkan sistem pertemuan untuk menentukan layak

atau tidaknya untuk mendapatkan suatu proyek pelaksanaan pembangunan.

Korupsi yang dilakukan sudah menjadi masalah nasional hendaknya ada suatu upaya pemecahan dari aspek-aspek yuridisnya. Hal ini berhubungan dengan segala bentuk proses penegakan hukum. Dalam hal ini yang terpenting dalam suatu hukum.⁹ adalah:

“(1) bahwa pemberian pidana bertujuan untuk dapat mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (2) bahwa perlu mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikan orang menjadi baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat, (3) bahwa perlu menyelesaikan konflik yang timbul akibat suatu tindak pidana dan memulihkan serta mendatangkan rasa damai untuk dapat hidup bermasyarakat.”

Menghadapi semakin meningkatnya dimensi, kuantitas dan kualitas kejahatan, bisa saja terjadi kecenderungan para aparat hukum melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar batas hukum, hal ini mengakibatkan tidak dilaksanakan penegakkan hukum sebagaimana seharusnya dirasakan oleh masyarakat. Dimana hal ini diajukan dengan mengingat antara lain kesadaran bahwa aparat-aparat penegak hukum mempunyai peranan yang menonjol dalam melakukan perlindungan hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara material, ini berarti peningkatan wibawa penegakan hukum harus ditekankan pada makna penegakkan hukum secara material.

Pada kasus No.62/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang pengadaan peralatan kesehatan puskesmas oleh dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang telah menetapkan status terdakwa menjadi tersangka dan mutlak menjadi tahanan , kasus ini merupakan kategori kasus Pidana Khusus, dalam

⁹ (Djoko prakoso, 1986: 393)

surat tersebut telah di putuskan masa hukuman dan denda sangsi yang harus dibayar, serta pemaparan barang bukti.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Maka, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 62/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk?

E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bandar lampung.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Adapun kegunaan teoritis penelitian ini. Merupakan suatu upaya pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini dimungkinkan menjadi bahan pertimbangan untuk dilaksanakan penelitian lanjutan. Sedangkan kegunaan praktis, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi fakultas syariah IAIN Raden Intan Lampung.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi saat di tengah masyarakat, jadi mengadakan penelitian

mengenai beberapa masalah aktual yang kini berkecembuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala dan proses sosial. Disini penulis langsung kelapangan untuk menganalisa penerapan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi di bandar lampung sebagai suatu objek penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.¹⁰

Penelitian dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sipatnya umum terhadap kenyataan dari pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi di kota bandar lampung (kejari).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang di peroleh terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari interview. Yakni tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di kota bandar lampung.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, laporan dan arsip-arsip dari kajari bandar lampung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode interview (wawancara)

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peniliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap

¹⁰ Hotman M. Siahaan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), h. 1.

dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.¹¹ Interview dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari para penegak hukum terkait tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri di bandar lampung.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah dilakukan oleh penegak hukum untuk memberantas para koruptor yang ada di tatanan pemerintahan kota bandar lampung. Peneliti melakukan wawancara terhadap pimpinan pengadilan negeri dan jajaran yang terkait; Sehingga dapat menjadi data penting dalam penelitian ini.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹² Dengan kata lain yang dimaksud dengan dokumen disini adalah sekumpulan surat-surat formal atau surat-surat kantor atau dinas.

Dengan demikian jelaslah bahwa dokumentasi adalah pengumpulan surat-surat resmi yang mendukung fakta penelitian atau data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa sejarah berdirinya kajari, Struktur keorganisasian kajari, Ruang lingkup kinerja kajari dan Data kasus dan macam-macam korupsi setahun terakhir.

4. Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul melalui beberapa tahapan diatas, seorang peneliti didalam mengolah datanya menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 64.

¹² Kunandar, *Langkah Mudah Penelitiayn Tindakan Kelas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 274.

- a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah
- b. Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum. Kongkrit ditarik dari generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.¹³

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.¹⁴ Hal ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari tempat penelitian, sehingga mendapatkan gambaran keadaan dan praktik yang berlangsung dalam pelaksanaan penegakan hukum di kota Bandar Lampung. Kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I* (Yogyakarta: Andi Press, 2002), H. 42.

¹⁴ Kartini Kartono, *pengantar metodologi riset sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam (*Risywah*)

1. Pengertian

Ajaran hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi pemeliharaan akan kesucian baik lahir maupun bathin, menghendaki agar manusia (umat islam) dalam melakukan sesuatu harus sesuai fitrahnya, yakni apa yang telah ditentukan dalam *al-Quran* dan *As Sunnah* yang merupakan sumber hukum tertinggi. Pemeliharaan akan kesucian begitu ditekankan dalam hukum Islam, agar manusia (umat Islam) tidak terjerumus dalam perbuatan kehinaan atau kedhaliman baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Pelanggaran sesuatu hal dalam hukum (pidana) Islam tidak terlepas dari tujuan pokok hukum Islam (*al maqashid asy-syari'ah alkhamis*) yang merupakan hal esensial bagi terwujudnya ketentraman hidup manusia. Adapun tujuan pokok hukum Islam tersebut adalah memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Salah satu tujuan pokok hukum Islam ialah memelihara keselamatan (kesucian) harta. Harta merupakan rezeki dalam arti material, karena dalam bahasa agama rezeki meliputi rezeki material dan rezeki spiritual.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan (kesucian) harta termasuk menjadi tujuan pokok hukum (pidana) Islam, karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yakni dimensi halal dan dimensi haram. Perilaku korupsi adalah harta berdimensi haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah. Secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (*jinayah* atau *jarimah*) dimana bagi pelakunya diancam dengan hukuman hudud (*had*) dan juga hukuman *ta'zir*.

Dalam Fiqih Kalsik Jarimah dibagi ke dalam tiga bagian:

a) Jarimah Hudud

Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan merupakan hak Allah.

Jarimah hudud meliputi: Zina, Qadzaf, Meminuh Khamr, Pencurian, Hirabat, Riddah dan Albaghyu (pemberontakan)

b) Jarimah Qishas-Diyat

Yaitu jarimah yang diancam dengan Qishas dan diyat. Baik qishas maupun diyat keduanya telah ditentukan syara'. Perbedaan dengan hukum had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak Masyarakat) sedangkan qishas dan diyat adalah hak manusia (individu).

Meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

Islam membagi Istilah Korupsi kedalam beberapa Dimensi. Yaitu *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian) *al gasysy* (penipuan) dan *khianat* (penghianatan). Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap (*risywah*) dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, akan tetapi menurut *fuquha* bagi pelaku suap-menyuap ancaman hukumannya berupa hukuman *ta'zir* (*jarimah ta'zir*) yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Suap adalah memberikan sesuatu kepada orang penguasa atau pegawai dengan tujuan supaya yang menyuap mendapat keuntungan dari itu atau dipermudahkan urusannya. Jika praktek suap itu dilakukan dalam ruang lingkup peradilan atau proses penegakkan hokum maka hal itu merupakan kejahatan yang berat atau sejahat-jahatnya kejahatan. Abu Wail mengatakan bahwa apabila seorang hakim menerima hadiah, maka berarti dia telah makan

barang haram, dan apabila menerima suap, maka dia sampai pada kufur.¹

Yang kedua, Korupsi dalam dimensi pencurian (*saraqah*). *Saraqah* (pencurian) menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Sedangkan menurut Abdul Qadir ‘Awdah pencurian didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi *sariqah* adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (rakyat/masyarakat). Dalam *syariah* ancaman terhadap pelaku *sariqah* (pencurian) ditentukan dengan jelas sebagaimana yang disebutkan dalam surat *Al Maidah*: 38, Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا

نَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Maidah:38)

Sehubungan dengan hukuman potong tangan dalam *jarimah sariqah* (pencurian) terdapat perbedaan pendapat apakah juga berlaku terhadap korupsi karena berdasarkan hadist Nabi SAW, yang bersabda:

“Tidak dipotong tangan atas penghianatan harta (koruptor), perampok dan pencopet”.

Yang ketiga, Korupsi dalam dimensi penipuan (*al gasyasy*). Secara tegas berdasarkan sabda Rosulullah saw,

¹ http://alquran.babinrohis.esdm.go.id/images/5/5_38.

Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Terlebih penipuan itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempecundangi rakyatnya.

“Dari Abu Ya’la Ma’qal ibn Yasar berkata: “Aku mendengar Rosulullah saw. Bersabda :” seorang hamba yang dianugerahi Allah jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya; maka Allah mengharamkannya masuk surga.” (H.R. Bukhari dan Muslim).²

Yang keempat, Korupsi dalam dimensi *khianat* (penghianatan). Bahasa Agama tentang korupsi yang sebenarnya adalah *khianat* (penghianatan), *khianat* berkecenderungan mengabailak, menyalahgunakan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang dan kepercayaan yang amanahkan kepada dirinya. *Khianat* adalah pengingkaran atas amanah yang dibebankan kepada dirinya atau mengirangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Perilaku *khianat* akan menyebabkan permusuhan diantara sesama karena orang yang berkhianat selalu memutar-balikkan fakta, dan juga berakibat terjadinya destruksi baik secara moral, social maupun secara politik-ekonomi. Islam melarang keras bagi orang-orang yang beriman terhadap perbuatan *khianat* baik terhadap Allah, Rasul serta terhadap sesamanya. Dalam surat *Al-Anfal*: 27, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا

أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang

² H.R. Bukhari dalam Bab Syirkah, no. 2496 dan Bab Syahadat no. 2686; Tirmidzi dalam Bab Al-Fitan, no. 2173; Ahmad no. 4/268; dan Baihaqi dalam Sunan al-Kubra no. 7576 dalam bab Syu’b al-iman

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Anfal:27)

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya korupsi (dengan berbagai nama) dalam Islam digolongkan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan pelakunya dikualifikasi sebagai orang-orang yang munafik, dzalim, fasik dan kafir, serta merupakan dosa besar yang ancamannya (selain *had* dan *ta'zir*) adalah neraka jahannam.³

2. Unsur-Unsur Risywah

Unsur atau dalam istilah yang lain disebut dengan rukun, adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah tindakan. Dikarenakan unsur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa lepas dan memberikan suatu kepastian hukum tertentu. Secara garis besar, unsur dalam suap memiliki kesamaan dengan akad *hibah*, karena suap adalah *hibah* yang didasarkan atas tujuan untuk suatu tindakan yang dilarang oleh syari', seperti membatalkan yang hak atau untuk membenarkan suatu yang batil. Selain itu, memakan harta *risywah* diidentikkan dengan memakan harta yang diharamkan Allah. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam *risywah* adalah:

- a. Penerima suap (*Al-murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya. Seperti si A menyuap temannya sendiri yang bernama si B untuk tidak memberitahukan kepada orang tuanya si A kalau si A telah bolos

³ 26 Juni 2013 di <http://newjoesafirablog.blogspot.com>

sekolah, atau bisa juga seorang yang memiliki keinginan tertentu dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat biasa agar masyarakat tersebut bersedia untuk memilihnya dalam pemilu yang akan datang.

- b. Pemberi suap (*Al-rasyi*) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.
- c. Suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain⁴.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam hukum Islam

Ada banyak Ayat di dalam Alqur'an dan Hadits yang menjelaskan posisi atau hukum tindak pidana korupsi dalam pandangan Islam.

a. Alqur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta

⁴<https://perpuskampus.com/pengertian-unsur-unsur-hukum-macam-macam-dan-hal-yang-identik-dengan-risywah/>

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”⁵

Ayat di atas jelas jelas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara cara yang tidak benar. Dan "larangan" dalam pengertian aslinya bermakna "haram", Dan ke"haram"an ini menjadi lebih jelas, ketika Allah menggunakan lafadh “bilitsmi” yang artinya "dosa". Dari sini, jelas mengambil harta yang bukan miliknya — termasuk diantaranya korupsi — adalah haram hukumnya, sama haramnya dengan pekerjaan berzina, membunuh dan semacamnya.



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁶

Seperti yang pertama, ayat ini pun melarang dengan tegas mengambil harta orang dengan cara-cara tidak benar, bedanya ayat ini memberikan

⁵ QS. Al-Baqarah : 188

⁶ QS. An-Nisaa':29

solusi bagaimana mengambil harta orang lain tetapi dengan cara yang benar, salah satu di antaranya dengan melakukan jual beli atau transaksi dagang yang terlandasi kerelaan diantara pembeli dan penjual. Yang menarik, dalam ayat ini disebutkan dengan jelas larangan membunuh diri sendiri – apalagi membunuh orang lain – setelah larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, sehingga – paling tidak – hukum dan hukuman orang yang memakan harta orang lain dengan cara batil sama dengan hukum dan hukuman membunuh orang, kalau tidak saya katakan "lebih berat", mengingat penyebutan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil didahulukan dari larangan membunuh.



Larangan untuk melakukan perbuatan korupsi walaupun secara literer tidak terdapat langsung mengenai arti kata korupsi, namun secara analogi ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut melukiskan tentang beberapa definisi korupsi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam pembahasan ini, penulis hanya mengemukakan dalil-dalil tentang al-‘ghashab (penggunaan hak orang lain tanpa izin), al-‘ghulul (penyelewengan harta negara), ar-risywah (suap), al-khianah (khianat), dan al-haraabah (perampasan). Sedangkan as-sariqah (pencurian) sudah tercakup dari keseluruhan definisi tersebut. As-sariqah (pencurian) menurut penulis hanya berlaku bagi kasus pencurian di mana hasil curian telah dimanfaatkan oleh si pencuri tanpa dikembalikan hasil curiannya sehingga berlaku hukum potong tangan dalam hukum Islam. Sedangkan bagi koruptor, wajib hukumnya mengembalikan hasil usaha korupsinya secara utuh dan dikenakan hukuman sesuai dengan syari’at Islam berdasarkan putusan hakim. Surat al-Maidah ayat 42:

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ. (رواه أحمد و الأربعة و حسنه الترمذی و صححه ابن حبان)

Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum.”⁷

حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَ هَذَا أُهْدِي لِي. فَقَالَ لَهُ: أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَ أَتْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَ هَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِينَ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا خَوَازٍ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَمَقْدُ

⁷ H.R. Bukhari dalam Bab Syirkah, no. 496 dan Bab Syahadat no. 2686; Tirmidzi dalam Bab Al-Fitan, no. 2173; Ahmad no. /268; dan Baihaqi dalam Sunan al-Kubra no. 7576 dalam bab Syu'b al-iman

بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُقْرَةِ إِبْطَيْهِ. (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ فِي: ٨٣ كِتَابُ الْإِيمَانِ وَ النُّذُورِ ٣ بَابُ كَيْفَ
كَانَتِ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

Artinya: “Abu Humaid Assa’id r.a. berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah atau zakat, kemudian setelah selesai dia datang kepada Nabi SAW dan berkata: ini untukmu dan yang ini hadiah yang diberikan orang kepadaku. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya: mengapakah Anda tidak duduk saja di rumah ayah atau ibu Anda untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak (oleh orang lain)? Kemudian setelah shalat, berdiri, setelah tasyahud memuji Allah selayaknya, lalu bersabda: Amma Ba’du, mengapakah seorang pegawai yang disertai amal, kemudian dia datang lalu berkata: ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak. Demi Allah! Yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidak ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi), melainkan dia akan menghadap di hari kiamat memikul di atas lehernya, jika berupa unta bersuara, atau lembu yang menguak, atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata: kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya

sehingga aku dapat melihat putih ketiaknya.⁸”

4. Macam – macam tindak pidana korupsi

a. *Ghulul* (Penggelapan)

Ghulul adalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang.⁹ Istilah *ghulul* sendiri diambil dari al-Qur“an surat *Ali-Imran* ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُ فَإِنَّهُ يَأْتِ بِمَا غُلَّ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya:

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apayang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

b. *Sariqah* (Pencurian)

Sariqah terambil dari kata bahasa arab *sariqah* yang secara *etimologis* berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi- sembunyi dan dengan tipu daya.¹⁰

Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qadir Audah mendefinisikan *sariqah* sebagai

⁸ *Ibid*

⁹ .NurulIrfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 81.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 117.

tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya, seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur.¹¹

Pencurian dilarang dengan tegas oleh Allah melalui Al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

c. *Khiyanat* (Khianat)

Khiyanat (khianat) adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila janji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Oleh karena itu, Allah SWT sangat membenci dan melarang *khianat*. Allah berfirman dalam surat *al-Anfaal* ayat 37:

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ

¹¹Ahsin Sakho Muhammad, dkk (Eds), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, hlm.519.

بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُوهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُوهُ فِي
جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal :27)

Menurut al-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, *khianata* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan *khianat* juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah *mu'amalah*.¹²

d. *Risywah* (Suap)

Secara *harfiah*, suap (*risywah*) berarti batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran.¹³ Menurut Ibrahim-Nakha "suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan *maslahat* (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip."¹⁴

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah

¹² Abd. Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 913.

¹³ *Ibid* hlm. 914

¹⁴ Abu Fida "Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2004, hlm.4.

berfirman dalam surat *al-Maidah* ayat 42:

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَلُونَ لِلْحَقِّ فَإِنْ جَاءُوكَ
فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
يُضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putus kanlah (perkaraitu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putus kanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian sendi kehidupan. Ibnu mas'ud berujar, "*Risywah* tumbuh di mana-mana." Kasus suap menyuap juga merupakan intensitas paling tinggi. Hampir semua bidang bisa kerasukan jenis korupsi ini. *Risywah* mempunyai nama atau istilah yang bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi.¹⁵

Seorang pejabat boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat: pertama, pemberi hadiah bukan orang yang sedang terikat perkara dan urusan. Kedua, pemberian tersebut tidak melebihi kadar

¹⁵ *Ibid* hlm. 11

volume kebiasaan sebelum menjabat.¹⁶

e. *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/ Harta Orang Lain)

Secara terminologis *ghasab* di definisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan.¹⁷ M. Nurul Irfan mendefinisikan *ghasab* yaitu mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai, jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi khianat. Karena terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisamirip dengan perampokan, namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan. Karena terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi. Kemudian karena yang diambil bukanlah harta, melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain.

Beberapa hak seseorang seperti hak untuk membuat batas kepemilikan tanah, hak untuk menduduki jabatan, hak untuk beristirahat dengan duduk-duduk di masjid, di tempat-tempat umum, dan hak-hak lain termasuk hak-hak privasi maka kalau hak-hak dimaksud dikuasai, direbut atau diambil oleh seseorang, perbuatan jelas merupakan tindakan *ghasab*.¹⁸

Diantara yang melarang perbuatan *ghasab* adalah firman Allah dalam surat *an-Nisa* ayat 29:

¹⁶*Ibid* hlm. 16

¹⁷Lihat al-Syarbini, *Mughnial-Muhtaj*, jilid 2, hlm. 275.

¹⁸M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 88

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

f. *Hirabah* (Perampokan)

Hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.

Dalil *naqli* tentang perampokan disebutkan secara tegas didalam surat *al-Maidah* ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ

لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangandan kakimereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia,dandi akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

g. *Hadiyyah* (Gratifikasi)

Pemberian hadiah menjadi sebuah bentuk korupsi apabila untuk memuluskan kepentingan sesuatu. Seperti memberi hadiah kepada pejabat untuk mendapatkan keuntungan (Proyek).

B. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum Korupsi dalam hukum Positif

Kata korupsi berasal darikata latin *corruption* darikata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutar balikkan.Secara harafiah,korupsi berarti kebusukan,kebejatan,ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral,penyimpangan dari kesucian,kata-kata atau ucapan yang memfitnah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁹,Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.Sedangkan didunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionarry*

¹⁹Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Pasal 435 KUHP menjelaskan korupsi berarti busuk, buruk, bejat, dan dapat di sogok, atau disuap pokoknya merupakan perbuatan yang buruk.²⁰ Perbuatan korupsi Dalam istilah *kriminologi* digolongkan kedalam kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek Undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak secara langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus di tangani serius dan khusus untuk itu perlu dikembangkan peraturan- peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya.

Tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat digolongkan dalam dua golongan :

- a. Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- b. Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- a. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

²⁰Pasal 435 KUHP.

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara(Pasal 2 ayat (1)).

- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan kan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan wewenang,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- d. Setiaporang yang melakukan percobaan,pembantuan,atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- e. Setiap orang diluar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan,sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) diatas maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 tahun 2001,unsur melawan hukum mencakup perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang dimakasud

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi:

- a. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Perbuatan tersebut diatur dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila dilihat dari sumbernya dapat di bagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bersumber dari perumusan pembuatan Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 16.
- b. Bersumber dari pasal-pasal KUHP yang di tari

menjadi Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

2. Sejarah Hukum Tipikor di Indonesia

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan.

Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya peraturan penguasa militer yang berlaku di daerah kekuasaan angkatan darat (Peraturan Militer No. PRT/PM/06/1957). Kemudian ada lagi tim pemberantasan korupsi tahun 1960 dengan munculnya perpu tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tidak pidana korupsi. Perpu itu lalu di kukuhkan menjadi UU No. 24/1960. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melancarkan “operasi budhi” khususnya untuk mengusut karyawan-karyawan ABRI yang dinilai tidak becus. Waktu itu perusahaan-perusahaan belanda diambil alih dan dijadikan BUMN, “Oprasi Budhi” antara lain mengusut mayor suhardiman (kini may jen TNI, PUR) meskipun akhirnya dibebaskan dari dakwaan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif

Dalam *ToolKit* Anti Korupsi yang dikembangkan oleh PPB di bawah naungan *Centre of International Crime Prevention (CICP)* dari *Unoffice Drug Control And Crème Prevention (ON-ODCCP)*, dipublikasikan 10 bentuk tindakan Korupsi, yaitu :

a. Pemberi suap/ Sogok (*Bribery*)

Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak

lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu.

b. Penggelapan (*Emmbezzlement*)

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah di berikan kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik Negara oleh pejabat publik maupun swasta.

c. Pemalsuan (*Fraud*)

Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui oranglain atau organisasi dengan maksud untuk menguntungkan dan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain.

d. Pemerasan (*extortion*)

Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat public untuk perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik atupun kekerasan.

e. Penyalahgunaan jabatan/wewenang (*abus of Discretion*)

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan sementara bersikap *diskriminatif* terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

f. Pertentangan Kepentingan/Memiliki UsahaSendiri (*Internal Trading*)

Melakukan transaksi public dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan mempergunakan kesempatan dan jabatan yang di milikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.

g. Pilih Kasih (*Favoritisme*)

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, *apiliasi* partaipolitik,.Suku,agama dan golongan yang bukan

kepada alasan *obyektif* seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, *profesionalisme* kerja.

h. Menerima Komisi (*Commission*)

Pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang dan lain-lain sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah.

i. Nepotisme (*Nepotisme*)

Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.

j. Kontribusi atau Sunbangan Ilegal (*Illegal Contribution*)

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang di bebaskan kepada kontrak-kontrak pemerintah.

4. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam hukum Positif

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah disebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang diletakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam dan kerusakan lingkungan seperti banjir, bahkan Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa akibat

negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.²¹

Aktivitas para penegak hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu sesuai dengan harapan. Konfigurasi politik suatu Negara akan mempengaruhi aktifitas penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini disebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selalu melibatkan penyelenggara negara atau pejabat Negara. Hal ini berbeda apabila para pihaknya adalah orang biasa dalam hal ini penegak hukum lebih bebas untuk mengekspresikan kewenangannya dalam menegakkan keadilan dan hukum. Dalam hal salah satu pihaknya Negara atau pejabat Negara penegak hukum akan ekstra hati-hati dalam menggunakan kewenangannya sehingga akan timbul kesan lambat, tebang pilih dan sebagainya. Dalam kondisi demikian asas *Equality Before the Law* akan dibuktikan kebohongannya, dan hanya akan dipercaya sebagai sebuah *mitos* belaka. Berkaitan dengan hal ini Romli Atmasasmita menyatakan:²²

Dampak negatif dari keadaan diatas adalah muncul fenomena *ambivalensi* sikap dan perilaku pejabat pemerintahan dan bahkan penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya menaati hukum dan menegakan hukum. Berbagai kasus korupsi yang menyangkut pejabat tinggi dan mereka yang dekat dengan kekuasaan ditindak lanjuti secara *selektif* dan menampilkan diskriminasi secara terbuka, *resistensi* terhadap agenda pemberantasan korupsi mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan, mulai dari lontaran keresahan pejabat daerah dan calon pemimpin

²¹Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Hlm. 80

²²*Ibid.* Hlm. 89

proyek sampai kepada gagasan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengurangi peranan lembaga Negara yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.²³

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara, pejabat Negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat didalam masyarakat. Dalam hal ini Harkristuti Harkrisnowo menyatakan:²⁴

Baik korupsi maupun tindak pidana biasa, kedua golongan kasus tersebut sama- sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yakni *pelaku* dan *korban*. Pelaku korupsi terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, "...dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan- kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya..."

Sedangkan pelaku tindak pidana jalanan umumnya adalah anggota masyarakat dari strata bawah yang tidak mempunyai akses kemana-mana, juga tidak memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Korban korupsi memang tidak kasat mata dan bukan individu, tetapi Negara, justru karena *invisibility* inilah maka public kebanyakan tidak merasakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan warga (setidaknya secara langsung). Lain halnya dengan tindak pidana jalanan jauh lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana korupsi, demikian persepsi masyarakat yang sulit untuk diubah karena kasat matanya tindak pidana jalanan.²⁵

²³ Atmasasmita, Romli. 2008. *Arah Pembangunan Hukum di Indonesia*, dalam Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial. Komisi Yudisial. Hlm.116

²⁴ *Ibid.* Hlm. 120

²⁵ Harkrisnowo, Harkristuti. 2009. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, dalam jurnal kajian putusan pengadilan DICTUM, Le I P 1.

Pembicaraan penegakan hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini akan semakin menarik lagi ketika dikaitkan dengan reformasi. Reformasi merupakan sebuah gerakan yang dipelopori mahasiswa berhasil menumbangkan kekuasaan rezim Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Tuntutan pangerakan reformasi telah diakomodasi oleh Lembaga tertinggi Negara waktu itu yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Beberapa tuntutan tersebut adalah:

- a. Amandemen UUD 1945; Penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI;
- b. Penegakan supremasi hukum penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- a. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi);
- b. Mewujudkan kebebasan pers; dan
- c. Mewujudkan kehidupan demokrasi.²⁶

Masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu agenda yang harus direalisasikan oleh pemegang kekuasaan pada era reformasi ini. Hal ini menunjukkan permasalahan penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat menggelisahkan kehidupan bangsa dan Negara pada masa rezim Suharto, sehingga muncul sebagai salah satu agenda dari gerakan reformasi disamping agenda-agenda yang lain.

Barda Nawawi ketika berbicara tentang fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi. Beliau mengatakan

Hlm. 6

²⁶ Sekretariat Jenderal MPR. 2003. Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR RI. Jakarta. Hlm. 6

fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya samadengan pengertian penegakan hukum pidana.²⁷

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana Muladi juga mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum identik dengan sistem peradilan, sebagaimana dikatakan olehnya sebagai berikut:

Sistem peradilan peradilan pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakekatnya suatu proses menegakkan hukum, jadi hakekatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”.

Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “sistem Peradilan Pidana” (dikenal dengan istilah SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) pada hakekatnya merupakan “Sistem Peradilan Pidana” yang pada hakekatnya juga identik dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana” (SKK-HP).²⁸

Bertolak dari pengertian yang demikian maka penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

²⁷ Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Hlm. 157

²⁸ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm. 20.



BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung karang

1. Sejarah

Gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang semula berada di Jalan Teuku Umar No.19 Tanjungkarang, merupakan gedung PT. Kereta Api Indonesia. Kemudian Sejak berdirinya gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mulai tanggal 6 Mei 1967 kegiatan perkantoran pindah ke Jalan Rudolf Walter Monginsidi/Beringin No. 27 Teluk Betung sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengalami beberapa kali pengembangan tahun 1996-1997 menambah 2 (dua) buah ruang sidang. Ditahun 2005 terjadi pembongkaran besar-besaran. Gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang semula menghadap kearah Utara kemudian di alihkan menghadap ke arah timur dengan bangunan 2 (dua) lantai, 1 (satu) baseman.

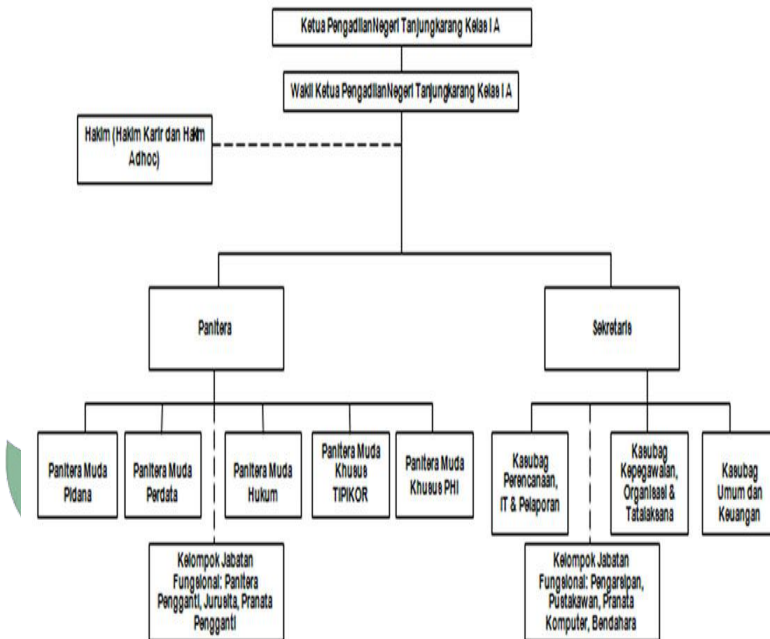
Untuk lantai dasar terdiri dari 7 ruang sidang biasa, 1 (satu) ruang sidang anak dan 1 (satu) Ruang sidang Utama, Ruang Panitera Muda Pidana, Ruang Panitera Perdata, Ruang Jaksa, Ruang Posbakum Ruang Juru Sita, Ruang Wartawan, Ruang Tunggu Anak dan Ruang Arsip.

Sedangkan lantai 2 terdiri dari ruangan Ketua Pengadilan Negeri, Ruang Panitera, Ruang Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ruang Mediasi/Diversi, Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Ruang Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Ruang Hakim 3, Ruang Panitera Pengganti 3, Ruang Panitera Pengganti 1, Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan, Ruang Persediaan ATK, Ruang Panitera Pengganti 2, Ruang Hakim Ad Hoc Tipikor, Ruang Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial, Ruang Panitera Muda Tipikor, Ruang Sekretaris, Ruang Wakil Panitera, Ruang Hakim 2 , Ruang Hakim 1. Untuk bagian Baseman Ruang Tahanan Wanita, Ruang tahanan Pria, Ruang Tahanan Anak.

Gedung Utama dihancurkan kemudian di bangun kembali dengan melalui 5 tahap (tahun 2005 sampai dengan 2009). sedangkan untuk gedung yang berada dibawah (gedung lama) masih digunakan untuk ruang panitera Muda Hubungan

Industrial, dan Ruang Panitera Muda Hukum, Mushola dan Rumah Penjaga Kantor

2. Struktur Organisasi



3. Arti Lambang

- BENTUK : Perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur
- ISI :

1) GARIS TEPI

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima) sila dari pancasila)

2) TULISAN

Tulisan " PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

3) LUKISAN CAKRA

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan.

Pada lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya cakra, dalam keadaan "diam" (statis), tetapi cakra yang terdapat pada Lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda : vlam).

Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

Jadi pada lambang Pengadilan Negeri , cakra digambarkan sebagai cakra yang "aktif", bukan cakra yang "statis"

4) PERISAI PANCASILA

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 jo. pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 yang rumusannya berbunyi : " Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

5) UNTAIAN BUNGA MELATI

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

6) SELOKA " DHARMMAYUKTI"

Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan " dharmmayukti " yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan double M, huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "A" seperti pada ucapan kata "ACARA ", "DUA" "LUPA" dan sebagainya.

Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "O" seperti lafal "O" pada kata "MOTOR", "BOHONG" dan lain-lainnya.

Kata "DHARMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berujud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

4. Motto

"P R I M A" yaitu : PROFESIONAL, RAMAH, INFORMATIF, MELAYANI dan AKUNTABEL.

5. Visi dan Misi

a. VISI :

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Yang Agung "

b. MISI :

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.

6. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut :

a. Ketua

- 1) Ketua mengatur pembagian tugas Para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- 2) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan.

- 3) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
- b. Wakil Ketua
- 1) Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka panjang pelaksanaannya dan pengorganisasiannya
 - 2) Mewakili Ketua bila berhalangan.
 - 3) Melaksanakan Delegasi wewenang dari Ketua,
 - 4) Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
- c. Hakim
- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek serta pengorganisasiannya.
 - 2) Melakukan pengawasan pada bagian-bagian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua.
 - 3) Melakukan pengawasan dan pengamatan (Kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Permasyarakatan dan melaporkannya kepada Ketua
- d. Panitera
- 1) Pelaksanaan kordinasi, pembiaanaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus
 - 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajiaan data perkara dan transparansi perkara

- 6) Pelaksanaan keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan
- 7) Pelaksanaan mediasi.
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KPN.

Dengan membawahi :

- a) Kepaniteraan Muda Perdata
- b) Kepaniteraan Muda Pidana
- c) Kepaniteraan Muda Khusus TIPIKOR
- d) Kepaniteraan Muda Khusus PHI
- e) Kepaniteraan Muda Hukum
- f) Panitera Pengganti
- g) Jurusita /Jurusita Pengganti

e. Sekretaris

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program anggaran
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaiaan
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic
- 6) Pelaksanaan urusan surat meyrurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
- 7) keprotokolan hubungan masyarakat dan perpustakaan
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Dengan membawahi :

- a) Subbagian perencanaan, tehnologi informasi dan pelaporan
- b) Subbagian kepegawaiaan, organisasi dan tata laksana
- c) Subbagian umum dan keuangan

- d) Fungsional Arsiparis
 - e) Fungsional Pustakawan
 - f) Fungsional Pranata Komputer
 - g) Fungsional Bendahara
- f. Wakil Panitera
- 1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 - 2) Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
 - 3) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
 - 4) Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara.
 - 5) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
 - 6) Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
- g. Panitera Muda Perdata
- 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
 - 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Perdata.
 - 3) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
 - 4) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
 - 5) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila memintanya.

- 6) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.
 - 7) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
- h. Panitera Muda Pidana
- 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
 - 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Pidana.
 - 3) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
 - 4) Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya.
 - 5) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
 - 6) Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
 - 7) Menyiapkan berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.
 - 8) Menyiapkan berkas permohonan Grasi.
 - 9) Menyerahkan arsip berkas perkara/ permohonan Grasi kepada Panitera Muda Hukum.
- i. Panitera Muda Hukum
- 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
 - 2) Mengumpul, mengolah dan mengkaji data.
 - 3) Menyajikan statistik perkara.
 - 4) Menyusun laporan perkara.
 - 5) Menyimpan arsip berkas perkara.

j. Panitera Muda Tipikor

- 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.
- 3) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- 4) Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya.
- 5) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- 6) Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
- 7) Menyiapkan berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.
- 8) Menyiapkan berkas permohonan Grasi.
- 9) Menyerahkan arsip berkas perkara/ permohonan Grasi kepada Panitera Muda Hukum.

k. Panitera Muda PHI

- 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara hubungan industrial.
- 3) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- 4) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.

- 5) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila memintanya.
- 6) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi atau Peninjauan Kembali.
- 7) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

1. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti membantu Hakim dalam persidangan perkara Perdata, Pidana , Tipikor serta PHI dan melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

m. Juru Sita

Juru Sita bertugas melaksanakan melaksanakan semua perintah yang di berikan oleh Ketua Pengadilan Negeri , Ketua Majelis & Panitera.

n. Sub Bagian perencanaan, tehnologi informasi dan pelaporan

- 1) Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 2) Menyusun rencana pembinaan dan peningkatan SDM
- 3) Menyusun rencana perancangan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Meningkatkan kualitas data yang lebih akurat dan tepat waktu
- 4) Meningkatkan layanan kepada pengguna pengadilan
- 5) Meningkatkan laporan dukungan
- 6) Membuat adminisitrasi inventaris perangkat IT
- 7) Proses Penyempurnaan Website PN
- 8) Menghimpun laporan dari masing-masing bagian kepaniteraan dan kesekretariatan
- 9) Membuat data evaluasi dan laporan kegiatan layanan informasi

- o. Sub Bagian kepegawaiaan, organisasi dan tata laksana
 - 1) Melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina adminstrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
 - 2) Menyelenggarakan sumpah Pegawai Negeri Sipil.
 - 3) Mengusulkan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Karis/Karsu.
 - 4) Mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan Gaji Berkala.
 - 5) Membuat usulan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan pimpinan dan BAPERJAKAT.
 - 6) Membuat daftar urut kepangkatan (DUK).
 - 7) Membuat daftar Bezetting.
 - 8) Mengisi aplikasi komdanas.
 - 9) Pelaksanaan Rapat/Tatap muka
- p. Sub Bagian umum dan keuangan
 - 1) Membuat gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang kehormatan Hakim AD HOC PHI dan TIPIKOR, uang makan, uang lembur, gaji ke-13, Remunerasi dan pertanggung jawabannya.
 - 2) Mengajukan UP/TUP dan penggantian UP/TUP ke KPPN sesuai dengan PMK No. 190/PMK.05/2012.
 - 3) Membuat SPP menggunakan aplikasi SPM dan menyimpan back up datanya.
 - 4) Menerima, membukukan, menyetorkan kepada Bank Persepsi, serta melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran PNPB kepada Sekretaris dan ke Korwil setiap bulan.
 - 5) Menerima, menyimpan, membayar tagihan dan mempertanggung jawabkannya dengan cara menginput dalam aplikasi SILABI.

- 6) Memungut pajak baik itu PPN, PPH 21, PPH 22, PPH 23, dan melaporkannya ke kantor pajak paling lambat tanggal 14 setiap bulan.
- 7) Membuat LPJ bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan melaporkannya kepada KPPN.
- 8) Membuat Laporan bulanan menggunakan aplikasi SAPLA dan mengajukan rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan paling lambat 7 hari kerja diawal bulan.
- 9) Membuat laporan realisasi anggaran dan melaporkannya ke KORWIL.
- 10) Membuat laporan TRIWULAN (PP No. 39 tahun 2006/aplikasi Bapennas) dan membuat laporan semester, tahunan (catatan atas laporan keuangan).
- 11) Membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12) Pengelolaan surat masuk/keluar.
- 13) Pengadaan ATK.
- 14) Pengelolaan Perpustakaan.
- 15) Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor/rumah dinas.
- 16) Keamanan kantor.
- 17) Membuat laporan Simak BM

4. Hasil Wawancara

Wawancara Peneliti Dengan Hakim Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas Satu A Tanjung Karang

Nara sumber: Said Situmorang

Ketua Hakim : Said Situmorang

Hakim 1 : Zulkifli Hakim

Hakim 2 ; Anwar Amin

- a. Peneliti: bagaimana pelaksanaan hukuman tindak pidana korupsi terkait keputusan no 62/pid.sus-Tpk/2015/Pn-Tjk?

- b. Nara sumber: kalau kita sudah mengacu pada suatu kasus, disana sudah ada pertimbangannya tergantung pada hakim yang menangani kasus tersebut untuk diberikan keputusan sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh terdakwa
- a. Peneliti: bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana korupsi?
- b. Nara sumber; pada dasarnya secara global hanya ada di diri hakim masing-masing kalau secara formal nya tidak ada. Karena kita diatur oleh undang-undang sendiri. (undang undang no 31 tahun 1999) namun dalam hakimnya sendiri harus mengacu kepada nilai nilai masyarakat.
- a. Bagaimana proses pengajuan terhadap tindak pidana korupsi?
- b. Kalo pengadilan sifatnya hanya menerima berkas dari kejaksaan, kalau nanti ada pelimpahan dari kejaksanaan baru diterima di pengadilan. Kalau dari awal kan yang berwenang kan kepolisian atau kpk. Tiga instansi ini khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Kalau sudah matang di tiga intansi tersebut baru BAP dilimpahkan ke kejaksanaan.
- a. Terkait kasus korupsi apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan?
- b. Berkas-berkas korupsi dan data-data barang bukti
- a. Apakah penyelesaian persidangan di pengadilan negeri kelas satu a tanjung karang menggunakan hukum islam?
- b. Itulah yang saya bilang tadi. Kalau secara formal kita tidak menggunakan hokum islam kita menggunakan hak pribadi masing-masing. Karena undang undang sendiri mengacu itu bukan hokum islam yang terapkan.

Adapun yang diwawancarai adalah hanya bapak said situmorang sedangkan hakim satu dan dua hanya memberikan data terkait dengan pembahasan peneliti.

B. Putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk

1. PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa I ALVI HADI SUGONDO ANAK DARI KUON MIN NYI selaku Direktur PT. KARYA PRATAMA dan Terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIS, SE Bin MUHAMMAD NUR selaku karyawan Marketing/Pemasaran PT. KARYA PRATAMA bersama-sama dengan ARDY PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. Aji Agung Langgeng Abadi dan Drs. SUDIYONO. WS, Apt, M.Kes Bin MIRUN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor SK : G/486/B.V/ HK/2012 Tanggal 21 Juni 2012 (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara Bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 Angka (5), Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Melakukan atau Turut Serta Melakukan, Secara Melawan Hukum yaitu mengatur penyusunan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak berdasarkan data Harga Pasar Setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga HPS menjadi jauh lebih tinggi dari harga pasar yang wajar, mengatur penyusunan Spesifikasi Teknis sehingga mengarah kepada merk/produk tertentu, bersekongkol dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar Prosedur dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA 2012.

Mengatur proses pelelangan sedemikian rupa sehingga PT. Aji Agung Langgeng Abadi dapat menjadi pemenang di dalam pelelangan tersebut serta mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain yaitu Terdakwa I ALVI HADI SUGONDO sebesar Rp. 3.060.652.547,- (tiga miliar enam puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), dan memperkaya ARDY PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGGNG ABADI sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah), yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp. 3.110.652.547,- (tiga miliar seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sesuai dengan penghitungan kerugian keuangan negara dari Ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung dengan Surat Nomor : SR-1228/PW08/5/2015 tanggal 6 Juli 2015. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2012 terdapat pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program

Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung yang anggarannya berasal dari APBNTugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 2304/024-04.01/07/2012 sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).

- b. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung adalah Drs. SUDIONO, WS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung selaku Pengguna Anggaran Nomor : SK:G/486/B.V/HK/2012 tanggal 12 Juni 2012, dengan pelaksanaan Pelelangan oleh POKJA 20 unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung yang diketuai oleh LORENSIUS HERI PURNOMO.
- c. Bahwa sekitar awal bulan Juni 2012 Drs.SUDIONO, WS., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung mendatangi terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIZ di kantor PT. KARYA PRATAMA tempat dimana terdakwa II bekerja sebagai Marketing pada perusahaan tersebut yang beralamat di Jl. Komplek Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok I/22 Jalan Kamal Outering Road Cengkareng Jakarta Barat dan bersepakat dengan Terdakwa II untuk bersama-sama melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut, dengan cara Terdakwa II yang akan membuat referensi harga pembanding guna pembelian HPS seakan-akan berasal dari 3 (tiga) Perusahaan pengedar Alkes yang berbeda dan Terdakwa II

juga yang akan mengatur Perusahaan-perusahaan yang akan diikuti sertakan dalam proses pelelangan sehingga diperoleh Perusahaan Pemenang lelang yang telah disiapkan oleh Terdakwa II.

- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIS menghubungi MUSTAKIM selaku Direktur PT. NURI UTAMA SANJAYA untuk meminjam perusahaan tersebut guna dijadikan tempat survei harga oleh pihak PPK Dinkes Propinsi Lampung dalam pekerjaan pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, dan kemudian Terdakwa II membuat surat penawaran harga sebagai Referensi pembuatan HPS dengan memuat daftar merk, type dan harga alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan pengadaan tersebut dengan menggunakan surat penawaran yang mengatasnamakan PT. NURI UTAMA SANJAYA untuk diberikan kepada Drs. SUDIONO, WS selaku PPK. Demikian juga surat penawaran dengan tujuan yang sama telah diberikan oleh terdakwa II kepada DRS. SUDIONO, WS selaku PPK dengan mengatas namakan PT. KARYA PRATAMA dan PT. MEDIS RAYA.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIS menghubungi saudara ARDY PRIANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI di kantornya dan meminta kepada saudara ARDY PRIANTO PANGESTU untuk bekerja sama dengan Terdakwa II dengan meminjamkan PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI milik saudara ARDY kepada Terdakwa II guna diikuti sertakan di dalam proses pelelangan pekerjaan pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012.

- f. Bahwa kemudian Terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIS juga telah menghubungi dan meminta kepada Saudara KGS DEDY. N selaku Direktur PT. SITI NADYA BERSAUDARA agar Saudara KGS DEDY. N mengikutsertakan Perusahaan miliknya tersebut dalam proses lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 dengan syarat apabila Perusahaan miliknya keluar sebagai pemenang proses lelang tersebut maka PT. SITI NADYA BERSAUDARA diharuskan untuk mengambil ataupun membeli seluruh peralatan kesehatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut pada PT. KARYA PRATAMA karena seluruh spesifikasi alat kesehatan yang terdapat di dalam paket pekerjaan tersebut adalah merupakan spesifikasi alat kesehatan yang hanya dimiliki oleh PT. KARYA PRATAMA. Saudara KGS DEDY. N selaku Direktur PT. SITI NADYA BERSAUDARA bersedia dan menyetujui syarat dan perjanjian yang diajukan oleh Terdakwa II tersebut, dan kemudian Saudara KGS DEDY. N menindak lanjutinya dengan menghubungi Saudara SYOVINAL selaku Direktur PT. RIZKY PRATAMA MEDIKA untuk meminjam Perusahaan tersebut guna dipakai selaku Perusahaan pendamping dalam mengikuti proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 tersebut guna memenuhi persyaratan minimal 3 (tiga) Perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan tersebut.
- g. Bahwa Terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIS telah meminta Surat dukungan kepada 11 (sebelas) Perusahaan Agen/Vendor Distributor Alkes untuk diberikan kepada PT. AJI AGUNG LANGGENG

ABADI, PT. SITI NADYA BERSAUDARA, dan PT. RIZKY PRATAMA MEDIKA untuk dipergunakan sebagai syarat kelengkapan dalam Surat Penawaran yang diajukan oleh ketiga perusahaan tersebut di atas dalam mengikuti proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012, yaitu masing-masing adalah PT. BLESINDO, PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO, PT. MATESU ABADI, PT. PANCA RAYA KRISNA MANDIRI, PT. BETA MEDICAL, PT. WIRAPITU USAHA BERSAMA, PT. EMS INDO APLIANCES, PT. KARYA PRATAMA, PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA, PT. LABORA, dan PT. GOLDEN STAR.

- h. Bahwa Saudara DRS. SUDIONO, WS selaku PPK telah menggunakan data-data mengenai harga Alat Kesehatan untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012, yang seakan-akan dikirimkan oleh 3 (tiga) perusahaan yang berbeda yaitu PT. KARYA PRATAMA, PT. NURI UTAMA SANJAYA, PT. MEDIS RAYA, padahal pada kenyataannya ketiga data pembandingan harga tersebut semuanya diperoleh dari Terdakwa II, sebagai dasar pembuatan HPS pekerjaan tersebut.
- i. Bahwa kemudian DRS. SUDIONO, WS selaku PPK telah meminta kepada POKJA 20 Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung yang diketuai oleh Saudara Lorensius Heri Purnomo untuk melakukan proses pelelangan terhadap pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 yang dimulai sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 15 Agustus 2015 melalui

LPSE Propinsi Lampung dengan memakai metode Pasca Kualifikasi sistem gugur dan menggunakan dokumen pengadaan yang antara lain berisikan HPS sebesar Rp. 13.414.212.031,- (tiga belas milyar empat ratus empat belas dua ratus dua belas ribu tiga puluh satu rupiah) yang nilainya sudah diatur sedemikian rupa oleh Drs. SUDIONO, WS selaku PPK dan Terdakwa II sehingga jauh di atas harga pasar yang wajar.

- j. Bahwa terdapat 5 (lima) Perusahaan yang mendaftar serta mengajukan Surat dan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 secara elektronik melalui LPSE Propinsi Lampung, yaitu masing-masing PT. SABA MANDIRI PERKASA mengajukan penawaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), CV. MEGAH MANDIRI MEDIKA mengajukan penawaran sebesar Rp. 8.001.400.000,- (delapan milyar satu juta empat ratus ribu rupiah), PT. SITI NADYA BERSAUDARA mengajukan penawaran sebesar Rp. 12.941.811.000,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI mengajukan penawaran sebesar Rp. 13.072.711.500,- (tiga belas milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas lima ratus rupiah) dan PT. RIZKY PRATAMA MEDIKA mengajukan penawaran sebesar Rp. 13.144.500.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Bahwa dari 5 (lima) Perusahaan yang telah memasukkan Surat Penawaran kepada POKJA ULP pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung

TA 2012 tersebut diatas, 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI, PT. SITI NADYA BERSAUDARA, dan PT. RIZKY PRATAMA MEDIKA merupakan Perusahaan yang telah bersekongkol untuk memenangkan dan mendapatkan pekerjaan tersebut dan berada dibawah kendali Terdakwa II, sedangkan Saudara HASAN UMAR BIN UMAR SLAIMAN selaku Direktur PT. SABA MANDIRI PERKASA tidak pernah mengajukan Surat Penawaran terhadap pelelangan pekerjaan tersebut walaupun pada kenyataannya terdapat Surat Penawaran yang mengatas namakan PT. SABA MANDIRI MANDIRI PERKASA seakan- akan diajukan oleh saudara HASAN. Demikian pula Saudara ISMED CHRISANDY selaku Direktur PT. MEGAH MANDIRI MEDIKA tidak pernah mengikuti maupun memasukkan Surat penawaran dalam proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 yang dilaksanakan oleh Pokja ULP pekerjaan tersebut.

1. Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknik dan harga dalam proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 oleh POKJA ULP berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :435/ULP-Dinkes/Alkes/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 menetapkan PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut.
- m. Bahwa setelah ditetapkannya PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA

2012 oleh POKJA ULP Terdakwa II menemui saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU PRIYANTO PANGESTU di kantor PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI, pada saat itu saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU PRIYANTO PANGESTU menanyakan kepada Terdakwa II bagaimana pola kerjasama diantara mereka dalam melaksanakan paket pekerjaan yang telah dimenangkan pelelangannya oleh PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI tersebut, karena pada awalnya saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU PRIYANTO PANGESTU mengira bahwa mereka tidak jadi untuk ikut di dalam proses lelang tersebut akan tetapi ternyata PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI milik saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU PRIYANTO PANGESTU malah ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut. Terdakwa II menjawab, “Pak ARDI PRIYANTO PANGESTU Perusahaan Bapak kita pakai benderanyasaja, karena dalam proyek ini saksi sudah menyusun harga dan barang sudah lama”. Kemudian Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU bertanya kembali, “Kalau Perusahaan saksi dipakai sebagai bendera berapa FEE saksi? Terdakwa II menjawab,”nanti saksi tanyakan kepada ALVI ADI SUGONDO selaku Direktur PT. KARYA PRATAMA”.

- n. Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2012 Terdakwa I ALVI HADI SUGONDO selaku Direktur PT. KARYA PRATAMA bertemu dengan saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU di BANK MANDIRI Kebun Jeruk Jakarta Barat. Pada awalnya pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan bentuk komitmen kerjasama antara PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI dengan PT. KARYA PRATAMA dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan

Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012, akan tetapi Terdakwa I malah membicarakan mengenai masalah pembukaan Rekening baru PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI dengan menggunakan specimen tandatangan Terdakwa I yang akan digunakan sebagai Rekening Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan tersebut di atas. Pada saat itu audara ARDI PRIYANTO PANGESTU bertanya kepada Terdakwa I, “ Pak ALVI bentuk kerja sama dan komitmennya seperti apa?”, dijawab oleh Terdakwa I, “nanti sama Pak AZIZ aja ya Pak ARDI PRIYANTO PANGESTU”. Setelah itu Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU kembali ke kantornya.

- o. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa II kembali datang menemui saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU di kantor PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI dengan membawa dan menyodorkan sepucuk Surat Perjanjian Kejasama pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan TA 2012 antara PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI dengan PT. KARYA PRATAMA untuk ditandatangani oleh oleh saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI dimana di dalam Pasal II angka 1 Surat Perjanjian Kejasama tersebut PT. KARYA PRATAMA memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengadaan, penyimpanan barang, dan pendistribusian pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 sampai dengan 100% sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Pada saat itu Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU juga bertanya kepada Terdakwa II mengenai uang fee

yang akan diberikan oleh Terdakwa I selaku Direktur PT. Karya Pratama yang telah meminjam perusahaan milik Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alkes tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa fee yang akan diberikan oleh Terdakwa I kepada Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU adalah sebesar 1% dari nilai kontrak. Setelah Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatas ditandatangani oleh Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI selanjutnya Terdakwa II membawa surat tersebut kepada Terdakwa I untuk ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh Terdakwa I selaku Direktur PT. KARYA PRATAMA.

- p. Bahwa selanjutnya Drs. SUDIONO, WS selaku PPK pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 tersebut membuat dan menandatangani Dokumen Kontrak Nomor :447/ULP-Dinkes/ALKES/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan TA 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 448/ULP-Dinkes/ALKES/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012. Akan tetapi penandatanganan Kontrak tersebut baru dilakukan secara sepihak oleh Saudara Drs. SUDIONO, WS selaku PPK Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, dan belum terdapat tandatangan dari pihak PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI selaku penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya saudara Drs. SUDIONO, WS menyerahkan Dokumen Kontrak tersebut kepada Terdakwa II untuk dibawa dan diserahkan kepada Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU selaku penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan tersebut guna

untuk ditandatangani. Kemudian Terdakwa II membawa dokumen kontrak tersebut dan menemui Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU di Rumahnya yang berada di daerah DEPOK Jawa Barat, pada saat itu Terdakwa II memina kepada saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI untuk membubuhkan tandatangannya di dalam Dokumen Kontrak Tersebut, Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU sempat bertanya kepada Terdakwa II, "Zis, apakah kontrak ini saksi yang harus tandatangan?". Terdakwa II menjawab, "Tidak bisa dikuasakan harus Direktur PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI yang menandatangani". Setelah itu barulah Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU menandatangani Surat Perjanjian Kontrak tersebut di atas.

- q. Bahwa kemudian terdakwa I memerintahkan dan memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa II untuk bersama-sama dengan saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU membuat Akte Notaris tentang Pernyataan dan Kuasa Direksi Nomor 04 tanggal 5 September 2012 di kantor Notaris dan PPAT PRIYA TAKARI UTAMA, SH., M.Kn. di Depok Jawa Barat yang pada pokoknya berisikan tentang pelimpahan seluruh Hak dan Tanggng jawab dari PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 kepada PT. KARYA PRATAMA. Selain itu Akta Notaris itu juga memuat tentang Kuasa Direktur dari PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI kepada terdakwa I ALVI HADI SUGONDO selaku Direktur PT. KARYA PRATAMA yang akan digunakan sebagai dasar untuk pembukaan Rekening Bank dan

atau yang tertera pada Surat Perjanjian Kerjasama kedua belah pihak.

- r. Bahwa Terdakwa I atas sepengetahuan saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI telah membuka Rekening baru di BANK MANDIRI KCP Kebun Jeruk Jakarta Barat nama PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI dengan menggunakan tandatangan Terdakwa I dalam Spesimennya dengan Nomor Rekening : 165.000.401.787, yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012.
- s. Bahwa PT. AJI AGUNG LESTARI telah menerima pembayaran uang muka 20% pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 dari saudara SUDIYONO selaku PPK yaitu sebesar Rp. 2.614.542.300,- (dua milyar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2012 melalui Rekening BANK MANDIRI KCP Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan Nomor Rekening:165.000.401.787 milik PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI.

2. SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa I ALVI HADI SUGONDO ANAK DARI KUON MIN NYI selaku Direktur PT. KARYA PRATAMA dan Terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIS, SE Bin MUHAMMAD NUR selaku karyawan Marketing/Pemasaran PT. KARYA PRATAMA bersama-sama dengan ARDY PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. Aji Agung Langgeng Abadi dan Drs. SUDIYONO. WS, Apt, M.Kes Bin MIRUN selaku Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor SK : G/486/B.V/ HK/2012 Tanggal 21 Juni 2012 (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara Bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 Angka (5), Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, yaitu Terdakwa I ALVI HADI SUGONDO sebesar Rp.3.060.652.547,- (tiga miliar enam puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), dan memperkaya ARDY PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGGNG ABADI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, yaitu Kewenangan yang ada pada diri Drs. SUDIONO, WS selaku PPK Pekerjaan pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2012

mengatur penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak berdasarkan data Harga Pasar Setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga HPS menjadi jauh lebih tinggi dari harga pasar yang wajar, mengatur penyusunan Spesifikasi Teknis sehingga mengarah kepada merk/produk tertentu, dan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa I selaku Direktur PT. KARYA PRATAMA, Terdakwa II selaku Karyawan Marketing PT. KARYA PRATAMA serta ARDY PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI bersekongkol dengan Penyedia Barang/ Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar Prosedur dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Peralatan Kesehatan Puskesmas.

Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA 2012, serta mengatur proses pelelangan sedemikian rupa sehingga PT. Aji Agung Langgeng Abadi dapat menjadi pemenang di dalam pelelangan tersebut , serta mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp. 3.110.652.547,- (tiga miliar seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sesuai dengan penghitungan kerugian keuangan negara dari Ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung dengan Surat Nomor : SR-1228/PW08/5/2015 tanggal 6 Juli 2015, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2012 terdapat pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung yang anggaannya berasal dari

APBNTugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor :2304/024-04.01/07/2012 berasal Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).

- b. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung adalah Saudara Drs. SUDIONO, WS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung selaku Pengguna Anggaran Nomor : SK:G/486/B.V/HK/2012 tanggal 12 Juni 2012, dengan pelaksanaan Pelelangan oleh POKJA 20 unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung yang diketuai oleh Saudara Lorensius Heri Purnomo.
- c. Bahwa sekitar awal bulan Juni 2012 Drs.SUDIONO, WS., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung mendatangi terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIZ di kantor PT. KARYA PRATAMA tempat dimana terdakwa II bekerja sebagai Marketing padaperusahaan tersebut yang beralamat di Jalan Komplek Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok I/22 Jalan Kamal Outering Road Cengkareng Jakarta Barat dan bersepakat dengan Terdakwa II untuk bersama-sama melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut, dengan cara Terdakwa II yang akan membuat referensi harga pembanding guna pembelian HPS seakan-akan berasal dari 3 (tiga) Perusahaan pengedar Alkes yang berbeda dan Terdakwa II juga yang akan mengatur Perusahaan-perusahaan yang akan diikuti sertakan dalam proses

pelelangan sehingga diperoleh Perusahaan Pemenang lelang yang telah disiapkan oleh Terdakwa II.

- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIS menghubungi MUSTAKIM selaku Direktur PT. NURI UTAMA SANJAYA untuk meminjam perusahaan tersebut guna dijadikan tempat survei harga oleh pihak PPK Dinkes Propinsi Lampung dalam pekerjaan pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, dan kemudian Terdakwa II membuat surat penawaran harga sebagai Referensi pembuatan HPS dengan memuat daftar merk, type dan harga alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan pengadaan tersebut dengan menggunakan surat penawaran yang mengatas namakan PT. NURI UTAMA SANJAYA untuk diberikan kepada Drs. SUDIONO, WS selaku PPK. Demikian juga surat penawaran dengan tujuan yang sama telah diberikan oleh terdakwa II kepada DRS. SUDIONO, WS selaku PPK dengan mengatas namakan PT. KARYA PRATAMA dan PT. MEDIS RAYA.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIS menghubungi saudara ARDY PRIANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGENG ABADI di kantornya dan meminta kepada saudara ARDY PRIANTO PANGESTU untuk bekerja sama dengan Terdakwa II dengan meminjamkan PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI milik saudara ARDY PRIANTO PANGESTU kepada Terdakwa II guna diikutsertakan di dalam proses pelelangan pekerjaan pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIS juga telah menghubungi dan

meminta kepada Saudara KGS DEDY. N selaku Direktur PT. SITI NADYA BERSAUDARA agar Saudara KGS DEDY. N mengikutsertakan Perusahaan miliknya tersebut dalam proses lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 dengan syarat apabila Perusahaan miliknya keluar sebagai pemenang proses lelang tersebut maka PT. SITI NADYA BERSAUDARA diharuskan untuk mengambil ataupun membeli seluruh peralatan kesehatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut pada PT. KARYA PRATAMA karena seluruh spesifikasi alat kesehatan yang terdapat di dalam paket pekerjaan tersebut adalah merupakan spesifikasi alat kesehatan yang hanya dimiliki oleh PT. KARYA PRATAMA. Saudara KGS DEDY. N selaku Direktur PT. SITI NADYA BERSAUDARA bersedia dan menyetujui syarat dan perjanjian yang diajukan oleh Terdakwa II tersebut, dan kemudian Saudara KGS DEDY. N menindaklanjutinya dengan menghubungi Saudara SYOVINAL selaku Direktur PT. RIZKY PRATAMA MEDIKA untuk meminjam Perusahaan tersebut guna dipakai selaku Perusahaan pendamping dalam mengikuti proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 tersebut guna memenuhi persyaratan minimal 3 (tiga) Perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan tersebut.

- g. Bahwa Terdakwa II BUYUNG ABDUL AZIS telah meminta Surat dukungan kepada 11 (sebelas) Perusahaan Agen/Vendor Distributor Alkes untuk diberikan kepada PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI, PT. SITI NADYA BERSAUDARA, dan PT. RIZKY PRATAMA MEDIKA untuk

dipergunakan sebagai syarat kelengkapan dalam Surat Penawaran yang diajukan oleh ketiga perusahaan tersebut di atas dalam mengikuti proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012, yaitu masing-masing adalah PT. BLESINDO, PT. MEGA PRATAMAMEDICALINDO, PT. MATESU ABADI, PT. PANCA RAYA KRISNA MANDIRI, PT. BETA MEDICAL, PT. WIRAPITU USAHA BERSAMA, PT. EMS INDO APLIANCES, PT. KARYA PRATAMA, PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA, PT. LABORA, dan PT. GOLDEN STAR.

- h. Bahwa Saudara DRS. SUDIONO, WS selaku PPK telah menggunakan data-data mengenai harga Alat Kesehatan untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012, yang seakan-akan dikirimkan oleh 3 (tiga) perusahaan yang berbeda yaitu PT. KARYA PRATAMA, PT. NURI UTAMA SANJAYA, PT. MEDIS RAYA, padahal pada kenyataannya ketiga data pembandingan harga tersebut semuanya diperoleh dari Terdakwa II, sebagai dasar pembuatan HPS pekerjaan tersebut.
- i. Bahwa kemudian DRS. SUDIONO, WS selaku PPK telah meminta kepada POKJA 20 Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung yang diketuai oleh Saudara Lorensius Heri Purnomo untuk melakukan proses pelelangan terhadap pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 yang dimulai sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 15 Agustus 2015 melalui LPSE Propinsi Lampung dengan memakai metode

Pasca Kwalifikasi sistem gugur dan menggunakan dokumen pengadaan yang antara lain berisikan HPS sebesar Rp.13.414.212.031,- (tiga belas milyar empat ratus empat belas dua ratus dua belas ribu tiga puluh satu rupiah) yang nilainya sudah diatur sedemikian rupa oleh Drs. SUDIONO, WS selaku PPK dan Terdakwa II sehingga jauh di atas harga pasar yang wajar.

- j. Bahwa terdapat 5 (lima) Perusahaan yang mendaftar serta mengajukan Surat dan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 secara elektronik melalui LPSE Propinsi Lampung, yaitu masing-masing PT. SABA MANDIRI PERKASA mengajukan penawaran sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), CV. MEGAH MANDIRI MEDIKA mengajukan penawaran sebesar Rp.8.001.400.000,- (delapan milyar satu juta empat ratus ribu rupiah), PT. SITI NADYA BERSAUDARA mengajukan penawaran sebesar Rp.12.941.811.000,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI mengajukan penawaran sebesar Rp. 13.072.711.500,- (tiga belas milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas lima ratus rupiah) dan PT. RIZKY PRATAMA MEDIKA mengajukan penawaran sebesar Rp.13.144.500.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Bahwa dari 5 (lima) Perusahaan yang telah memasukkan Surat Penawaran kepada POKJA ULP pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 tersebut diatas, 3 (tiga) Perusahaan yaitu

PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI, PT. SITI NADYA BERSAUDARA, dan PT. RIZKY PRATAMA MEDIKA merupakan Perusahaan yang telah bersekongkol untuk memenangkan dan mendapatkan pekerjaan tersebut dan berada dibawah kendali Terdakwa II, sedangkan Saudara HASAN UMAR BIN UMAR SLAIMAN selaku Direktur PT. SABA MANDIRI PERKASA tidak pernah mengajukan Surat Penawaran terhadap pelelangan pekerjaan tersebut walaupun pada kenyataannya terdapat Surat Penawaran yang mengatasnamakan PT. SABA MANDIRI MANDIRI PERKASA seakan- akan diajukan oleh saudara HASAN. Demikian pula Saudara ISMED CHRISANDY selaku Direktur PT. MEGAH MANDIRI MEDIKA tidak pernah mengikuti maupun memasukkan Surat penawaran dalam proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 yang dilaksanakan oleh Pokja ULP pekerjaan tersebut.

- l. Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknik dan harga dalam proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 oleh POKJA ULP berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :435/ULP-Dinkes/Alkes/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 menetapkan PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut.
- m. Bahwa setelah ditetapkannya PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA

2012 oleh POKJA ULP Terdakwa II menemui saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU di kantor PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI, pada saat itu saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU menanyakan kepada Terdakwa II bagaimana pola kerjasama diantara mereka dalam melaksanakan paket pekerjaan yang telah dimenangkan pelelangannya oleh PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI tersebut, karena pada awalnya saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU mengira bahwa mereka tidak jadi untuk ikut di dalam proses lelang tersebut akan tetapi ternyata PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI milik saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU malah ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut. Terdakwa II menjawab, “Pak ARDI PRIYANTO PANGESTU Perusahaan Bapak kita pakai benderanya saja, karena dalam proyek ini saksi sudah menyusun harga dan barang sudah lama”. Kemudian Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU bertanya kembali, “Kalau Perusahaan saksi dipakai sebagai bendera berapa FEE saksi? Terdakwa II menjawab,”nanti saksi tanyakan kepada ALVI ADI SUGONDO selaku Direktur PT. KARYA PRATAMA”.

- n. Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2012 Terdakwa I ALVI HADI SUGONDO selaku Direktur PT. KARYA PRATAMA bertemu dengan saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU di BANK MANDIRI Kebun Jeruk Jakarta Barat. Pada awalnya pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan bentuk komitmen kerjasama antara PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI dengan PT. KARYA PRATAMA dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012, akan tetapi

Terdakwa I malah membicarakan mengenai masalah pembukaan Rekening baru PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI dengan menggunakan spesimen tandatangan Terdakwa I yang akan digunakan sebagai Rekening Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan tersebut di atas. Pada saat itu audara ARDI PRIYANTO PANGESTU bertanya kepada Terdakwa I, “Pak ALVI bentuk kerja sama dan komitmennya seperti apa?”, dijawab oleh Terdakwa I, “nanti sama Pak AZIZ aja ya Pak ARDI PRIYANTO PANGESTU ”. Setelah itu Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU kembali kekantornya.

- o. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa II kembali datang menemui saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU di kantor PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI dengan membawa dan menyodorkan sepucuk Surat Perjanjian Kejasama pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan TA 2012 antara PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI dengan PT. KARYA PRATAMA untuk ditandatangani oleh oleh saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI dimana di dalam Pasal II angka 1 Surat Perjanjian Kerjasama tersebut PT. KARYA PRATAMA memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengadaan, penyimpanan barang, dan pendistribusian pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 sampai dengan 100% sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Pada saat itu Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU juga bertanya kepada Terdakwa II mengenai uang fee yang akan diberikan oleh Terdakwa I selaku Direktur PT. Karya Pratama yang telah meminjam perusahaan milik Saudara ARDI PRIYANTO

PANGESTU untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alkes tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa fee yang akan diberikan oleh Terdakwa I kepada Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU adalah sebesar 1% dari nilai kontrak. Setelah Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatas ditandatangani oleh Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI selanjutnya Terdakwa II membawa surat tersebut kepada Terdakwa I untu ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh Terdakwa I selaku Direktur PT. KARYA PRATAMA.

- p. Bahwa selanjutnya Drs. SUDIONO, WS selaku PPK pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 tersebut membuat dan menandatangani Dokumen Kontrak Nomor :447/ULP-Dinkes/ALKES/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang pekerjaan Pengadaan Peralaan Kesehatan Puskesmas Perawatan TA 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 448/ULP-Dinkes/ALKES/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012. Akan tetapi penandatanganan Kontrak tersebut baru dilakukan secara sepihak oleh Saudara DRS. SUDIONO, WS selaku PPK Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, dan belum terdapat tandatangan dari pihak PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI selaku penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya saudara Drs. SUDIONO, WS menyerahkan Dokumen Kontrak tersebut kepada Terdakwa II untuk dibawa dan diserahkan kepada Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU selaku penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan tersebut guna untuk ditandatangani. Kemudian Terdakwa II membawa dokumen kontrak tersebut dan menemui Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU di

Rumahnya yang berada di daerah DEPOK Jawa Barat, pada saat itu Terdakwa II meminta kepada saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI untuk membubuhkan tandatangannya di dalam Dokumen Kontrak Tersebut, Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU sempat bertanya kepada Terdakwa II, "Zis, apakah kontrak ini saksi yang harus tandatangan?". Terdakwa II menjawab, "Tidak bisa dikuasakan harus Direktur PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI yang menandatangani". Setelah itu barulah Saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU menandatangani Surat Perjanjian Kontrak tersebut di atas.

- q. Bahwa kemudian terdakwa I memerintahkan dan memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa II untuk bersama-sama dengan saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU membuat Akte Notaris tentang Pernyataan dan Kuasa Direksi Nomor 04 tanggal 5 September 2012 di kantor Notaris dan PPAT PRIYA TAKARI UTAMA, SH., M.Kn. di Depok Jawa Barat yang pada pokoknya berisikan tentang pelimpahan seluruh Hakdan Tanggung jawab dari PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 kepada PT. KARYA PRATAMA. Selain itu Akta Notaris itu juga memuat tentang Kuasa Direktur dari PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI kepada terdakwa I ALVI HADI SUGONDO selaku Direktur PT. KARYA PRATAMA yang akan digunakan sebagai dasar untuk pembukaan Rekening Bank dan atau yang tertera pada Surat Perjanjian Kerjasama kedua belah pihak.
- r. Bahwa Terdakwa I atas sepengetahuan saudara ARDI PRIYANTO PANGESTU selaku Direktur

PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI telah membuka Rekening baru di BANK MANDIRI KCP Kebun Jeruk Jakarta Barat nama PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI dengan menggunakan tandatangan Terdakwa I dalam Spesimennya dengan Nomor Rekening :165.000.401.787, yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012.

- s. Bahwa PT. AJI AGUNG LESTARI telah menerima pembayaran uang muka 20% pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA 2012 dari saudara Drs. SUDIYONO, WS selaku PPK yaitu sebesar Rp. 2.614.542.300, (dua milyar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2012 melalui Rekening BANK MANDIRI KCP Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan Nomor Rekening:165.000.401.787 milik PT. AJI AGUNG LANGGENG ABADI.

3. Mengadili

- a. Menyatakan Terdakwa 1. ALVI HADI SUGONDO NAK DARI KUON MIN NYI dan Terdakwa .II, BUYUNG ABDUL AZIZ Bin M. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara Bersama-sama;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ALVI HADI SUGONDO ANAK DARI KUON MIN NYI DAN Terdakwa dan Terdakwa II. BUYUNG ABDUL AZIS BIN M. NUR dengan hukuman pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) Tahun Dan 1(satu) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp,50.000.000,00 (lima puluh Juta

Rupiah) Dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan Selama 1 (satu) Bulan;

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menghukum kepada para Terdakwa I. ALVI HADI SUGONDO ANAK DARI KUON MIN NYI DAN Terdakwa II. BUYUNG ABDUL AZIS BIN M. NUR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.155.966.747,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ke kas Negara
- f. Menetapkan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
- g. Menetapkan uang yang telah disita Rp. 250,000,000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dikompensasi dengan uang milik Para Terdakwa I. ALVI HADI SUGONDO ANAK DARI KUON MIN NYI DAN Terdakwa II. BUYUNG ABDUL AZIS BIN M. NUR yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 3.056.000.000,- (tiga milyar lima puluh enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.150.033.253,- (seratus lima puluh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) akan dikembalikan kepada para terdakwa sebagai kelebihan pembayaran uang pengganti;



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang

Suatu perbuatan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Disamping itu harus ada pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggung jawab. Di mana orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana maka prinsip utama yang berlaku adalah kesalahan pada pelaku. Menurut Vos pengertian kesalahan (*schuld*) mempunyai 3 (tiga) tanda khusus yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Mengenai pertanggung jawaban pidana, maka menurut teori hukum dikenal beberapa jenis sistem tanggung jawab, antara lain:

a. Doktrin Identifikasi

Doktrin pertanggung jawaban ini dapat mengkriminalisasi/ menuntut korporasi dalam kebanyakan delik. Pada sisi lain, doktrin ini membatasi pertanggung jawaban atau agen yang tidak mempunyai status sebagai pejabat senior, perusahaan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kecuali UU menetapkan dasar pertanggung jawaban yang lain.

- b. Doktrin Pertanggung Jawaban Pengganti (*Vicarous liability*) Yaitu pertanggung jawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain “*The*

legal responsibility of one person to the wrongful acts of another". Secara singkat sering diartikan "pertanggung jawaban pengganti". Seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggung jawaban demikian hampir semuanya ditunjukkan pada delik undang-undang, dan dasarnya adalah maksud pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara pertanggung jawaban pengganti maupun secara langsung.

Sebagai *ius constituendum*, masalah doktrin pertanggung jawab pengganti juga di tamping dan diatur dalam Rancangan KUHP 1999-2000, pasal 32 ayat (2), yang berbunyi : "Dalam hal tertentu, seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang".

- c. Doktrin pertanggung jawaban yang ketat menentukan undang-undang (*strict liability*) atau pertanggung jawaban mutlak (*Absolute Liability*). Pertanggung jawaban mutlak di maksudkan tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Artinya prinsip tanggung jawab yang memandang 'kesalahan' sebagai salah satu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.

Tanggung jawab mutlak adalah terjemahan dari istilah *strict liability*, yaitu istilah yang umumnya dipakai pengadilan modern, yang berarti tanggung jawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan:

- 1) Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum, tanpa sesuatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut atau
- 2) Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (*reasonable care*), yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dituntut ke pengadilan.

Majelis Hakim PN kelas IA Tanjung Karang dalam perkara No. 62/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk, yang menyatakan terdakwa Alvi Hadi Sugondo sebagai terdakwa I dan Buyung Abdul Azis, SE. pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan asat undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana telah terpenuhi atau tidak.

a. Setiap orang

Menurut martiman Prodjohanidjojo, menyebutkan bahwa setiap orang adalah subjek hukum tindak pidana korupsi dan menurut Subekti mendefinisikan subjek hukum pembawa adalah atau subjek dalam hukum. Setiap orang yang dimaksud disini adalah orang sebagai bujek hukum, dalam hal ini undang-undang tidak membedakan tiap orang apakah ia sebagai orang perorangan ataukah sebagai badan hukum, yang dalam konteks tindak pidanan yang didakwa melakukan perbuatan pidanan dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menurut Moeljadno orang yang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan delik, tetapi meskipun dia melakukan delik tidak selalu dipidana. Apabila orang yang melakukan tindak pidana itu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dikecualikan dari hukum, maka ia dapat dipertanggung jawabkan. Orang yang melakukan di sini termasuk orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, atau orang yang membujuk melakukan sesuai dengan pasa 55 KUHPidanan.

Berdasarkan analisis diatas unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Secara melawan hukum

Dalam penjelasan pasal 2 ayat(1) UU TPPK menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dipidana atau dikenakan nestapa.

Dalam kaitanya dengan perluasan unsure melawan hukum ini, berpendapat bahwa mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang muncul akhir-akhir ini, idealnya unsure perbuatan melawan hukum harus dipahami baik secara formil maupun materil karena:

- 1) Pertama, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka pemberatasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extra ordinary efforts*).
- 2) Kedua, dalam merespon perkembangannya kebutuhan hukum dalam masyarakat, agar dapat lebih memudahkan di dalam pembuktian sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit.

Menurut adami chazawi, istilah melawan hukum menggambarkan suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau dicela menurut pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam kontek rumusan tindak pidana pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dapat mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan, maka perbuatan tersebut

dianggap tercela dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela.

Berdasarkan analisis di atas maka unsure melawan hukum jelas telah terbukti.

- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pengertian memperkaya secara *harfiah* adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya menjadi banyak harta (uang dan sebagainya) yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang atau suatu badan belum kaya menjadi kaya, orang sudah kaya bertambah kaya.

Menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No.951/Pid/1982 tanggal 10 agustus 1982 dan No.275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi, walaupun hanya sebagian. Ada 3 poin yang harus dikaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Pertama, memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu perlu menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri.
- 2) Kedua, memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan pelaku langsung.
- 3) Ketiga, memperkaya korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 ayat (1) UU PTPK) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

Berdasarkan Analisis di atas, maka unsure melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi jelas terbukti.

- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menurut arti kata, ‘merugikan’ adalah sama artinya dengan ‘menjadi rugi atau menjadi berkurang’, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsure merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut penjelasan umum UU PTKP, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah:

“Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak yang timbul karena:

- 1) Berada dalam pengurusan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat, lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD. Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”.

Sedangkan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU PTKP adalah:

“Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Yang dimaksud kata ‘dapat’ menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam ketentuan ini kata ‘dapat’ sebelum frasa merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang

dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan telah dipidana.

Menurut H. Marwan Effendi, menyatakan kata 'dapat' didalam rumusan pasal tersebut, tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata tersebut padanya adalah kata 'bisa' atau dengan kata lain 'potensi', bukan 'mungkin' jadi kata 'dapat' mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak. Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut. Artinya perkiraan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur. Untuk mendapatkan ukuran kerugian tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.

Berdasarkan analisis diatas, maka unsure dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara jelas terbukti.

e. Dilakukan secara bersama-sama

Unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran 'deelneming' yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delict.

Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsure yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja dimaksud itu tidak akan dapat tercapati, jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka

tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Menurut SR Sianturi, mengemukakan pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W, 11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Berdasarkan analisa diatas, maka unsure dilakukan secara bersama-sama jelas telah terbukti.

f. Merupakan perbuatan berlanjut

Dalam pasal 64 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana pokok yang paling berat. Menurut ajaran perbuatan berlanjut, mempunyai 3 syarat, yaitu:

- 1) Adanya suatu niat
- 2) Perbuatan sejenis
- 3) Waktunya tidak terlalu lama

Berdasarkan analisis diatas, maka unsur merupakan perbuatan berlanjut jelas terbukti.

Dari analisis unsur-unsur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan asat undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidanayang telah diuraikan diatas, maka penulis berpendapat sama dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa Alvi Hadi Sugondo sebagai terdakwa I dan Buyung Abdul Azis, SE. terdakwa II telah terbukti bersalah karena perbuatanya telah sesuai dengan rumusan undang-undang yaitu Pasal 2

Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu setiap unsure setiap orang, unsure secara melawan hukum, unsure melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsure dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, unsure dilakukan secara bersama-sama dan unsure dilakkan secara berlanjtu.

Dimana telah dijelaskan adanya suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu telah sesuai dengan rumusaln anasir undang-undang serta perbuatan itu merugikan kepentingan masyarakat. Jadi menurut penulis, perbuatan Alvi Hadi Sugondo sebagai terdakwa I dan Buyung Abdul Azis, SE. terdakwa II dapat di kategorikan perbuatan pidana yakni Alvi Hadi Sugondo sebagai terdakwa I dan Buyung Abdul Azis, SE. terdakwa II secara melawan hukum telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut.

Berdasarkan hal-hal yang penulis kemukakan di atas, sudah selayaknya terdakwa dijatuhi hukuman, dimana telah terdapat unsure kesalahan pada diri terdakwa dan tidak terdapat alasan peniadaan pidanan dan karenanya terdakwa dapat diminta pertanggung jawabannya.

Pemberian pidana menurut penulis sudah tepat, karena majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan (perbuatan terdakwa sangat merugikan perekonomian dan keuangan Negara)

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Korupsi

Agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap istilah dalam kajian ini , perlulah penulis jelaskan mengenai beberapa pengertian :

- a. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mendeduk kekayaan pribadi, merugikan kepentingan Umum & Negara.
- b. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Di pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (200 juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah)
- c. Dalam hukum Islam korupsi masih masalah Ijtihadiyah, belum menjadi kesepakatan sebagian besar ulama, karena masalah korupsi terakumulasi berbagai bentuk maksiat antara lain :
 - 1) Melanggar amanat (salah satu ciri munafik)
 - 2) Mencuri (bila mencapai nishab / batas minimal 93,6 gram emas) terkena sanksi potong tangan.
 - 3) Perampokan, karena terdapat unsur perampasan haknya seseorang dengan menggunakan kekuasaan / kewenangan, terkena hukum potong tangan dan kaki sebatas pergelangan secara bersilangan.
 - 4) Penggelapan.
 - 5) Penyuapan.
 - 6) Kecerobohan dalam Administrasi / Menegemen.
 - 7) Pemerasan.
 - 8) Penipuan
 - 9) Pengkhianatan.

Dari beberapa pengertian di atas, korupsi adalah perbuatan yang merugikan Negara / Umum untuk kepentingan pribadi. Bisa dilakukan dalam bentuk penyelewengan jabatan, wewenang ataupun memberikan laporan palsu tidak sesuai dengan kenyataan. Pada koruptor terdapat sifat negatif yang menonjol yaitu: Ketamakan, Ketidak jujuran, Perasaan tega melihat orang lain menderita. Dari ketiga sifat inilah berkembang menjadi penipu, pemerasan, suap, penggelapan dan pengkhianatan.

Dalam pandangan hukum islam terhadap kasus ini telah dijelaskan bahwa: Sanksi hukum pada, *Risywah, Ghasab* tampaknya bersifat sanksi moral. *Risywah* mirip dengan *jarimah riddah*. Untuk dua jenis *jarimah* ini, walaupun dalam ayat *al-Qur'an* tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya.

Dalam menangani kasus-kasus penyuapan (*risywah*) di zaman rasul, beliau tampaknya lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari segala bentuk penyelewengan dan mengingatkan masyarakat akan adanya hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka yang akan ditimpakan kepada pelakunya.

Sementara itu, terdapat sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, dan Abu Ya'la yang mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W pernah bersabda "Barang siapa didapatkan dalam harta bendanya barang hasil *risywah*, (penyuapan) maka bakarlah harta benda itu dan pukul dia." Hadits tentang perintah membakar harta hasil *risywah* dan memukul pelakunya ini dinilai oleh hampir seluruh ulama ahli hadits sebagai hadits dha'if.

Dengan demikian, tindakan *risywah* (penyuapan) terhadap untuk memenangkan kepentingan tertentu misalnya dari pihak terdakwa agar meringankan hukumannya maka ia melakukan suap kepada hakim yang terkait. Maka harta hasil suap yang diperoleh hakim tersebut tidak dikriminalisasikan, melainkan secara berulang kali diancam dengan neraka sebagai sanksi *ukhrawi*, dengan tetap mengedepankan pembinaan moral, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat sehingga dalam satu kasus Rasulullah saw tidak berkenan menyolati jenazah pelaku *Risywah*. Bahkan, secara tegas Rasulullah S.A.W bersabda bahwa sedekah para koruptor dari hasil korupsiya tidak akan pernah diterima oleh Allah seperti ditolaknyaa ibadah shalat tanpa wudhu.

Dalam kasus korupsi pada zaman Rasulullah S.A.W, tindakan beliau lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat, beliau tidak mengkriminalisasikan

korupsi karena jumlah nominal harta yang dikorup itu relatif sangat kecil- kurang dari tiga *dirham*, hanya berupa mantel, dan bahkan hanya berupa seutas atau dua utas tali sepatu.

Seandainya jumlah yang dikorupsi itu mencapai jutaan atau ratusan juta rupiah, bahkan jutaan dolar maka pastilah sanksi hukum yang keras akan beliau tetapkan, bukan sekedar sanksi moral berupa tidak dishalati oleh Rasulullah S.A.W pada saat koruptor itu meninggal dan pasti tidak cukup hanya dengan diancam siksa neraka di akhirat, tetapi juga sanksi dunia.

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dari ranah *qishas* dan *hudud*. Dalam hal ini, Abdul Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syari'at (al-Qur'an dan Hadits), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup masyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.

Dalam beberapa *hadits* tentang *risywah*, disebutkan dengan pernyataan "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ" atau dengan "لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيَّ" "Allah melaknat penyuap dan penerima suap" atau dengan pernyataan lain "*laknat Allah atas penyuap dan penerimanya*". Para pihak yang terlibat dalam *jarimah risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menjadikan *risywah* dikategorikan ke dalam dosa-dosa besar. Namun, karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata cara menjatuhkan sanksi maka *risywah* dimaksud dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*.

C. Hasil Analisis Data

Jadi dalam Hukum Islam memandang bahwa penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang merupakan suatu keharusan, karena dalam *ALqur'an* dan *Hadist* Pun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hukuman yang detail kepada pelaku tindak pidana korupsi, namun hukuman hanya sebatas hukuman norma moral di masyarakat dan hukuman ancaman neraka, namun ketika memasuki harta pencurian secara tegas dalam Al-qur'an menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri harta orang lain tersebut haruslah di potong tanganya.

Akan tetapi berdasarkan penelitian ini setelah dilakukannya wawancara dengan bapak said situmorang selaku ketua hakim pengadilan negeri mengungkapkan bahwa seyogyanya hukum islam tidak diterapkan secara formal tergantung pada pihak hakimnya sendiri. Karena secara formal hukum di Indonesia menggunakan aturan undang-undang tentang hukum yang berlaku.

Dalam kasus korupsi yang terjadi pada saat ini, atau lebih tepatnya kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang ini ditangani secara hukum formal, sepenuhnya diberikan kepada kekuasaan Hakim yang mengadili, namun hakim harus mengingat norma-norma yang diterapkan di masyarakat, serta norma-norma agama.



BAB V

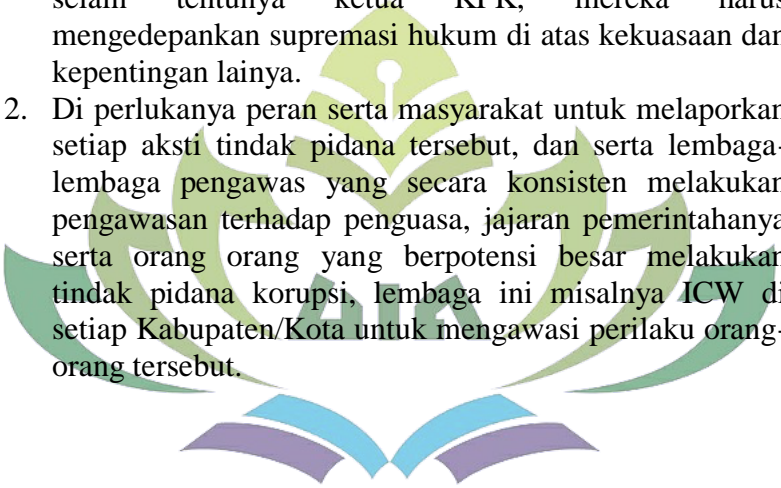
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penanggulangan Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang telah sesuai dengan Undang-undang dimana setiap pelaku tindak pidana korupsi yang telah memenuhi adanya unsur-unsur melakukan perbuatan korupsi dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan asat undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Hukum Islam memandang bahwa penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 62/Pid.Sus. Tpk/2015/PN-Tjk merupakan suatu kebolehan, karena dalam Alqur'an dan Hadist Pun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hukuman yang detail kepada pelaku tindak pidana korupsi, namun hukuman hanya sebatas hukuman norma moral di masyarakat dan hukuman ancaman neraka, namun ketika memasuki harta pencurian secara tegas dalam Al-qur'an menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri harta orang lain tersebut haruslah di potong tanganya. Dalam kasus korupsi yang terjadi pada saat ini, atau lebih tepatnya kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang ini secara hukum Islam, sepenuhnya diberikan kepada kekuasaan Hakim yang mengadili, namun sang hakim harus mengingat norma-norma yang diterapkan di masyarakat, serta norma-norma agama.

B. Saran-Saran

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sistemik dengan cara melakukan perubahan pada struktur dan pelaku yang dualitas hubungan keduanya menentukan wajah sistem. Upaya memerangi tindak pidana ini harus digerakkan serta didukung sepenuhnya oleh presiden dan pejabat yang menduduki posisi-posisi kunci seperti menteri, kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua MK, dan ketua-ketua pengadilan, selain tentunya ketua KPK, mereka harus mengedepankan supremasi hukum di atas kekuasaan dan kepentingan lainnya.
2. Di perlukanya peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap aksi tindak pidana tersebut, dan serta lembaga-lembaga pengawas yang secara konsisten melakukan pengawasan terhadap penguasa, jajaran pemerintahanya serta orang-orang yang berpotensi besar melakukan tindak pidana korupsi, lembaga ini misalnya ICW di setiap Kabupaten/Kota untuk mengawasi perilaku orang-orang tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990

.....*Asas-asas hukum mu'amalat (hukum perdata Islam)*,
(Jogjakarta:Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990).

al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2.

Andarisman, Tri, *Hukum Pidana, Asas-asas dan dasar Aturan Umum Hukum Pidanan Indonesia*, (Universitas Lampung, 2009),h.70

Atmasasmita, Romli. 2008. *Arah Pembangunan Hukum di Indonesia*, dalam *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial. Komisi Yudisial*.

Azhar Basjir. Ahmad, *Asas-asas hukum mu'amalat (hukum perdata Islam)*, (Jogjakarta:Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990).

Aziz Dahlan, Abd. (et all), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru

Chazwi, Adami, *HUKUM Pidanan Meteriil dan Formil di Indonesia*, Banyumedia publishing, Jakarta, 2003.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Fida, Abu dan Rafi, Abdur, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2004.

H.R. Bukhari dalam Bab Syirkah, no. 2493 dan Bab Syahadat no. 2686; Tirmidzi dalam Bab Al-Fitan, no. 2173; Ahmad no. 4/268; dan Baihaqi dalam Sunan al-Kubra no. 7576 dalam bab Syu'b al-iman

Hadi, Sutrisno, *Metode Research, Jilid I* (Yogyakarta: Andi Press, 2002), H. 42.

Hanafi, MA, Ahmad. *Asas-asas hukum pidana islam*. Bulan bintang. Jakarta 1967 .

Harkrisnowo, Harkristuti. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, dalam jurnal kajian putusan pengadilan DICTUM, Le I P 1. 2009.

Hotman M. Siahaan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Insan Cendikia, 2002.

Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.

Kartanegara, Satochid *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian kedua* , Rineka Cipta, Jakarta, 2000,

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

.....*pengantar metodologi riset sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kunandar, *Langkah Mudah Penelitiayn Tindakan Kelas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),

....., *Langkah Mudah Penelitiayn Tindakan Kelas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011,

Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I*, Yogyakarta: Andi Press, 2002.

M. Siahhaan, Hotman . *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Insan Cendikia, 2002).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekata Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

....., *Metode Penelitian Suatu Pendekata Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Muhammad, Ahsin Sakho .dkk (Eds), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995.

Nawawi Arief, Barda , *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1992.

....., *Seri Kuliah Perbandingan hukum pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Nurul Irfan, M. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Priyatno, Dwidji, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Cv Utomo, 2004.

Prodjohanidjojo, Martiman. *penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang nomor 31 Tahun 1999)*, Cv Mandar Maju, Bandung 2001.

Sarekat Putra Jaya. Nyoman. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra. 2008.

Sekretariat Jenderal MPR. 2003. Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR RI. Jakarta. Hlm. 6

Sianturi,SR, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, gramedia, Jakarta, 2004,

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h.146

....., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005

Tri Andarisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan dasar Aturan Umum Hukum Pidanan Indonesia*, Univesitas Lampung, 2009

Sumber website

http://alquran.babinrohis.esdm.go.id/images/5/5_38.

http://alquran.babinrohis.esdm.go.id/images/8/8_27.png

<http://newjoesafirablog.blogspot.com> 26 Juni 2013 di